

BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3)
 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
 tentang Kearsipan, Penyelenggaraan Kearsipan di tingkat
 kabupaten/kota merupakan tanggung jawab
 Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa untuk menjamin arsip yang autentik dan terpercaya, maka penyelenggaraan kearsipan perlu dikelola melalui sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsiapan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
- 4. Bupati adalah Bupati di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disingkat Kadis adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu.
- 7. Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 9. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 10. Unit kearsipan adalah satuan kerja pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
- 11. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip dilingkungannya.
- Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah yang termuat didalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan, penataan dan penemuan kembali arsip.
- 13. Kearsipan adalah hal-hal yang berkaitan dengan arsip.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Pedoman Klasifikasi Arsip adalah sebagai pedoman arsip yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak berkas ditempat penyimpanannya.

BAB III

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 3

Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ini dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 18 Februari 2019

BURATI KAPUAS HULU, A

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 19 Februari 2019

> PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

> > SARBANI

Salinan Sesuai dengan aslinya Kepafa Bagian Hukum Satda Kabupaten Kapuas Hulu

lisabet Roslin, SH., M.Si Pembina TK I NIP. 19671105 199003 2 010

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019 NOMOR 23

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

A. PENGERTIAN

- Klasifikasi Kearsipan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu disusun berdasarkan masalah, yang mencerminkan fungsi dan Kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat, diberi kode angka, dirinci secara desimal dengan menggunakan tiga angka dasar dilengkapi dengan kode pembantu.
- 2. Klasifikasi Arsip disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip-prinsip dari umum ke khusus.

Dalam hubungan masalah didahului kedua,perincian ketiga sebagai pola dasar yang berfungsi sebagai jembatan penolong dalam menentukan kode masalah yang tercantum dalam kode klasifikasi, dengan penulisan Klasifikasi sebagai berikut:

136

100 : Pokok Masalah ttg PEMERINTAHAN

130: Sub Masalah ttg PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA

136: Sub Masalah ttg PEMBAGIAN WILAYAH

- 4. Kegiatan Fasilitatif adalah kegiatan penunjang untuk membantu mempelancar tugas pokok dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan suatu instansi.
- 5. Kegiatan Substantif adalah kegiatan yang menyangkut fungsi dan tugas pokok organisasi yang bersangkutan dan bersifat operasional, kegiatan substantif ini membedakan antara organisasi satu dengan yang lainnya
- 6. Angka 100 sampai dengan 600 merupakan kode tugas-tugas substantif, sedangkan 100, 700, 800 dan 900 merupakan kode tugas-tugas fasilitatif. Kode 000 menampung masalah-masalah fasilitatif di luar pengawasan, kepegawaian dan keuangan. Disamping itu, juga ditampung masalah-masalah yang berkaitan dengan ke rumah tanggaan, seperti protokol urusan dalam dan masalah yang tak dapat dimasukan dalam kelompok lainnya, seperti perjalanan dinas, peralatan, lambang negara atau daerah, tanda-tanda kehormatan dan sebagainya.
- 7. Dengan demikian pokok masalah tersebut menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu termasuk instansi-instansi dalam lingkungannya.

Sepuluh pokok masalah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

000 UMUM

010 URUSAN DALAM

020 PERALATAN

030 KEKAYAAN DAERAH

040 PERPUSTAKAAN / DOKUMEN / KEARSIPAN / SANDI

050 PERENCANAAN DAN EVALUASI

060 ORGANISASI / KETATALAKSANAAN

070 PENELITIAN / PENGEMBANGAN

080 KONPERENSI / RAPAT KOORDINASI

090 PERJALANAN DINAS

100 PEMERINTAHAN

110 PEMERINTAHAN PUSAT

120 PEMERINTAHAN PROVINSI

130 PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA

140 PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN

150 LEGISLATIF MPR / DPR / DPD

160 DPRD PROVINSI

170 DPRD KABUPATEN / KOTA

180 HUKUM

190 HUBUNGAN LUAR NEGERI

200 POLITIK

210 KEPARTAIAN

220 ORGANISASI KEMASYARAKTAN

230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL

240 ORGANISASI PEMUDA

250 ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN

260 ORGANISASI WANITA

270 PEMILU, PILKADA

280 KOMISI PEMILIHAN UMUM

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

310 PERTAHANAN

320 KEMILITERAN / TNI

330 KEAMANAN

340 PERTAHANAN MASYARAKAT SIPIL

350 KEJAHATAN

360 BENCANA

370 KECELAKAAN

380 PENDAMPINGAN, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

390 KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

410 PEMBANGUNAN DESA / KELURAHAN

420 PENDIDIKAN

430 KEBUDAYAAN

440 KESEHATAN

445 RSU, RSJ, RS Khusus

450 AGAMA

460 SOSIAL

470 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

480 MEDIA MASSA

490 -----

500 PEREKONOMIAN

510 PERDAGANGAN

520 PERTANIAN

522 KEHUTANAN

523 PERIKANAN

524 PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

525 PERKEBUNAN

526 KETAHANAN PANGAN

527 PENYULUHAN

530 PERINDUSTRIAN

540 PERTAMBANGAN KESAMUDRAAN

550 PERHUBUNGAN

560 TENAGA KERJA

570 PENANAMAN MODAL

580 PERBANKAN / MONETER

590 AGRARIA

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

610 PENGAIRAN

620 JALAN

630 JEMBATAN

640 BANGUNAN

650 TATA RUANG / KOTA

660 TATA LINGKUNGAN

670 KETENAGAAN

680 PERALATAN

690 AIR MINUM

700 PENGAWASAN

710 BIDANG PEMERINTAHAN

720 BIDANG POLITIK

730 BIDANG KEAMANAN / KETERTIBAN

740 BIDANG KESEJAHTRAAN RAKYAT

750 BIDANG PEREKONOMIAN

760 BIDANG PEKERJAAN UMUM

770 -----

780 BIDANG KEPEGAWAIAN

790 BIDANG KEUANGAN

800 KEPEGAWAIAN

810 PENGADAAN

820 PENGANGKATAN DAN MUTASI

830 KEDUDUKAN

840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI

850 CUTI

860 PENILAIAN

870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN

880 PEMBERHENTIAN

890 PENDIDIKAN PEGAWAI

900 KEUANGAN

910 ANGGARAN 920 OTORISASI/AKUNTANSI 930 VERIFIKASI 940 PEMBUKUAN 950 PEMBENDAHARAAN 960 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN 970 PENDAPATAN

980 -----990 BENDAHARAWAN

B. RINCIAN.

KODE KLASIFIKASI 000 UMUM

001	Lambang
001.1	Garuda
001.2	Bendera Kebangsaan
001.3	Lagu Kebangsaan
001.4	Daerah
001.31	Provinsi
001.32	Kabupaten/Kota
002	Tanda Kehormatan / Penghargaan untuk pegawai
002.1	Bintang
002.2	Satyalencana
002.3	Samkarya Nugraha
002.4	Monumen
002.5	Penghargaan secara adat (Kalpataru, Upakarti, Adipura, dsb,
002.6	Pengharagaan lainnya
003	Hari Raya / Besar
003.2	Keagamaan
003.3	Hari Ulang Tahun / HUT (Hari Jadi Provinsi/ Kabupaten/
	Kota)
004	Ucapan
004.1	Terima Kasih
004.2	Selamat
004.3	Mohon Diri
004.4	Bela Sungkawa
004.5	Ucapan Lainnya
005	Undangan
006	Tanda Jabatan
006.1	Pamong Praja
006.2	Jabatan Lainnya
010	URUSAN DALAM
011	Gedung Kantor
011.1	Listrik
011.2	Telepon
011.3	Otomasi
011.4	Air Minum
011.5	Hidrant

011.6	Alarm
011.7	Internet
012	Rumah Dinas
010	Akomodasi / Persinggahan (Mess / Guest House/Wisma /
013	hotel)
014	Jasa Air
015	Jasa Listrik
016	Jasa Telpon
017	Keamanan / Ketertiban Kantor
018	Kebersihan Kantor
019	Protokol
019.1	Upacara Bendera
019.2	Tata tempat
019.21	Pemasangan gambar Presiden / Wakil Presiden
019.3	Audiensi
019.4	Penerimaan Tamu
019.5	Kerjasama
020	PERALATAN
021	Alat Tulis Kantor
022	Mesin Kantor
023	Perabot Kantor
024	Alat Angkut
025	Pakaian Dinas
026	Senjata
027	Pengadaan termasuk pengumuman pengadaan, penunjuk
	lelang.
027.1	Prakualifikasi : rapat persiapan, HPS, penjelasan pekerjaan /
	anwijzing, negoisasi, evaluasi
027.2	SPK, Kontrak / Amandemen / Addendum, Teguran
027.3	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
127.4	Serah Terima Pekerjaan
127.5	Pemeriksaan Pekerjaan
127.6	Perpanjangan Waktu / Ferce majore
127.7	Denda
127.8	Sanggahan
127.9	Pemeliharaan Barang / Jasa
028	Inventaris
028.1	Pendapatan Barang Milik Negara
028.2	Pemeliharaan Barang Milik Negara
028.3	Penghapusan Barang Milik Negara
029	
030	KEKAYAAN DAERAH
031	Barang-barang tidak bergerak (Tanah, Perkebunan, Pertanian,
031	Hutan ,Tambak)
032	Barang-Barang tidak bergerak (Gedung, Asrama, Monumen /
002	Bangunan Bersejarah dll)
033	Tanaman
034	Alat-Alat Berat
035	Hewan
036	Barang Persediaan Dalam Gedung
The second secon	

037	Alat Pengangkut (Darat, Laut, Udara)
038	Peralatan Pabrik , Laboratorium
039	Peralatan Kesehatan / Medis (Rumah Sakit, Balai Pengobatan)
040	PERPUSTAKAAN / DOKUMEN /KEARSIPAN / SANDI
041	Perpustakaan
041.1	Pameran Bahan Perpustakaan
041.2	Pengolahan (Katalog, Bibliografi)
041.3	Sirkulasi / layanan
041.31	Keanggotaan
041.32	Peminjaman dan Pengembalian
041.4	Deposit
041.5	Pemeliharaan, Pelestarian / alih media
041.6	Pembinaan Perpustakaan
041.61	Bantuan Buku, Rak
041.7	Penghapusan/ Penyusunan Bahan Perpustakaaan
041.8	Jenis - Jenis Perpustakaan (Umum, Khusus, PT, Sekolah, Keliling, Masyarakat)
041.9	Kemitraan, Forum Perpustakaan, Kerjasama antar
	Perpustakaan
042	Dokumentasi
043	
044	
045	Kearsipan
045.1	Pola Klasifikasi
045.2	Akuisisi Arsip
045.3	Penyusutan Arsip
045.31	Jadwal Retensi Arsip
045.32	Penilaian Arsip
045.33	Pemindahan Arsip
045.34	Penyerahan Arsip
034.35	Pemusnahan Arsip
045.4	Pembinaan Kearsipan
045.41	Pengawasan
045.42	Bimbingan Kearsipan
045.5	Pemeliharaan, Pelestarian / Konservasi Arsip
045.51	Fumigasi dan Termit Control
045.52	Laminasi
045.53	Alih Media
045.6	Layanan
045.7	Pemasyarakatan
045.71	Pameran
045.72	Penerbitan Naskah Sumber Arsip
045.73	Sosialisasi Kearsipan
045.8	Pengembangan Sistem
045.81	Sistem Kearsipan
045.82	Sistem Jaringan Informasi kearsipan
046	Sandi
047	Telegram, Telex, Radio, ISB
048	Data Elektronik
049	

050	PERENCANAAN
050.1	RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)
050.11	RENSTRA (Rencana Strategi)
050.12	RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah)
050.13	RENSTRA BAPPEDA
050.2	Program Nasional
050.21	RKP (Rencana Kerja Pembangunan)
050.22	RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran kementrian Lembaga)
050.23	RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)
050.24	Rencana Kerja SKPD
050.25	KUA (Kebijakan Umum Anggaran), KUPA (Kebijakan Umum
	Perubahan Anggaran dan PPAS (Penetapan Plafon Anggaran
	Sementara)
050.26	Jawaban Gubernur Atas Pandangan fraksi
050.27	Nota Keuangan
050.28	RKT (Rencana kerja Tahunan)
050.29	RKO (Rencana Kerja Operasional)
051	Bidang Pemerintahan
052	Bidang Politik
053	Bidang Keamanan/Ketertiban
054	Bidang Kesejahteraan Rakyat
055	Bidang Perekonomian
056	Bidang Pekerjaan Umum
057	Bidang Pengawasan
058	Bidang Kepewaian
059	Bidang Keuangan
060	ORGANISASI / KETATALAKSANAAN
061	Organisasi Instansi Pemerintah
061.1	Susunan Organisasi dan Tata Kerja
061.2	Tata tertib Kantor, Termasuk Pengaturan hari dan jam kerja Pegawai
062	Organisasi Badan Non Pemerintah
063	Organisasi Badan Internasional
064	Organisasi Badan Semi Pemerintah
065	Ketatalaksanaan
065.1	Tata Naskah Dinas
065.2	Stempel Dinas dan Stempel jabatan
065.3	Papan nama instansi pemerintah / non pemerintah
065.4	Alamat-alamat Kantor dan Pejabat
065.5	Ketentuan Pakaian Dinas dan Atribut
066	Tata Hubungan Kerja
067	Standart Operasional Prosedur
068	Evaluasi dan Laporan Ketatalaksanaan
069	Analisis Jabatan
069.1	Pengukuran / Penilaian beban kerja Jabatan Struktural dan
	Fungsional
069.2	Uraian Jabatan
070	PENELITIAN
071	Riset meliputi perijinan bagi peneliti, Riset Design, Pembahasa

072	Survey
072.1	Krenova (Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat)
072.2	SINAS (Sistem Inovasi Nasional)
072.3	SIDA (Sistem Inovasi Daerah) Meliputi Cluster, Kab / Kota, Desa Inovatif
072.4	Inkubator Tehnologi dan Bisnis
072.5	Pameran Produk Inovasi / Ristek
072.6	BTC (Bisnis Tehnologi Center)
072.7	Raptek (Penerapan Iptek)
072.8	HKI (Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual)
073	Kajian
073.1	Kajian Strategis / diskusi / Forum Group Discussion (FGD)
073.2	Seminar
073.3	Workshop
073.4	Rapat Koordinasi / Rapat Teknis
073.5	Lokakarya
073.6	Diseminasi / Sosialisasi Hasil Penelitian
074	Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi dan Instansi Lair
074.1	Instensi Pemerintah Pusat / Daerah
074.2	Perguruan Tinggi Negeri / Swasta
074.3	Lembaga swasta Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat
074.4	Lembaga Internasional
075	Perekayasaan
076	Jarlit Bang (Jaringan Penelitian dan Pengembangan)
077	Publikasi Ilmiah
077.1	Jurnal Ilmiah
078	
079	
080	KONFERENSI / RAPAT KOORDINASI
081	Gubernur
082	Bupati / Walikota
083	Komponen Eselon lainnya (termasuk Pimpinan SKPD)
084	Instansi –instansi Lainnya
085	Internasional di dalam Negeri
086	Internasional di luar Negeri
087	
088	
089	
090	PERJALANAN DINAS
091	Perjalanan Presiden / Wakil Presiden Ke Daerah
092	Perjalanan Menteri ke Daerah
093	Perjalanan Pejabat Tinggi dan Tinggi Negara di Daerah
094	Perjalanan Pegawai Tinggi/PNS, meliputi Surat Perintah Tugas (SPT)
005	
090	Perialanan Tamu Asina
095 096	Perjalanan Tamu Asing Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Luar Negeri
096	Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Luar Negeri

100 PEMERINTAHAN

Perincian Ketiga

100	PEMERINIAHAN
101	Tata Praja, Legislatif, Yudikatif, Hubungan Luar Negeri
102	GDN
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	PEMERINTAHAN PUSAT
111	Presiden
111.1	Pertanggungjawaban Presiden Kepada MPR
111.2	Amanat Presiden / Amanat Kenegaraan
112	Wakil Presiden
113	Susunan Kabinet
113.1	Reshufle
113.2	Penunjukan Menteri Intren
113.3	Sidang Kabinet, Sidang Stabilitas Ekonomi, lihat 500.1
114	Kementerian Dalam Negeri
114.1	Amanat Menteri Dalam Negeri
115	Kementrian Lainnya
116	Lembaga Tinggi Negara (DPA, MA, BPK)
117	Lembaga Non Kementerian
118	Otonomi/Desentralisasi/Dekonsentrasi
119	Kerjasama Antar Kementerian
120	PEMERINTAH PROVINSI
120.04	Laporan Daerah
120.042	Monografi tambahan Kode wilayah
.042.1	Koordinasi
121	Gubernur, meliputi pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
122	Wakil Gubrnur, meliputi pencalonan, Meninggal, Pengangkatan,
122	pelantikan, Pemberhentian, serah terima jabatan dan Sebagainya
123	Sekretris Wilayah, meliputi pencalonan, Meniggal, serah terima
120	jabatan
124	Pembentukan / Pemekaran
124.1	Pembinan/perubahan nama kepada : Daerah,kota,benda
124.1	geografis,gunung,sungai,pulau,selat,batas laut, dan sebagainya
124.2	Pemekran Wilayah
124.3	Forum Koordinasi lainnya
125	Pembentukan / Pemekaran Wilayah
125.1	Pembinan/perubahan nama kepada : Daerah,kota,benda
	geografis,gunung,sungai,pulau,selat,batas laut, dan sebagainya
125.2	Pembentukan wilayah

125.3	Pemindahan Ibukota
125.4	Perubahan Batas Wilayah
125.5	Pemekaran wilayah
125.6	Pemindahan Ibu Kota Provinsi
125.7	Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan
126	Pembagian Wilayah
127	Penyerahan Urusan
128	Swapraja/Penataan Wilayah/Daerah
129	
130	PEMERINTAH DAERAH TK.II KABUPATEN / KOTA
131	Bupati meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal,
	Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan
	Sebagainya. Sambutan/pengarahan/amanat
132	Wakil Bupati, meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal,
	Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan
133	Sekretaris Daerah meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal
134	Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan Forum Komunikasi Pmerintah Daerah
134.1	Muspida
134.1	Forum PAN (Panitia Anggaran Nasional)
134.3	Forum Koordinasi Lainnya
134.4	Kerjasama ntar Kabupaten/Kota
135	Pembentukan/Pemekaran Wilayah
135.1	Pemindahan Ibu Kota
135.2	Pembentukan Wilayah
135.3	Pembagian Wilayah Kabupatn / Kota
135.4	Perubahan Batas wilayah
135.5	Peekaran Wilayah
135.6	Permaslahan Batas wilayah
135.7	Pembentukan ibukota Kabpaten/Kota
135.8	Pemberian dan pengantian nama Kabupaten/kota,Daerah, Jalan
136	Pembagian wilayah
137	Penyerahan Urusan
138	Pemerintahan Wilayah Kecamatan
138.1	Sambutan/Pengarahan/Amanat
138.2	Pembentukan Kecamatan
138.3	Pemekaran Kecamatan
138.4	Perluasan / Perubahan batas wilayah Kecamatan
138.5 138.6	Pembentukan Perwakilan Kecamatan Pemindahan Ibu Kota Kecamatan
138.7	Laporan Kecamatan
139	
105	
140	PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN
141	Pamong Desa Meliputi Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, Pelantikan, Serah Terima, Penghasilan
	dsb
142	Penghasilan Pamong Desa / Kelurahan (APB Des / Kel)
143	Kekayaan Desa
144	Lembaga Tingkat Desa : Dewan Desa, Rembug Desa,
145	Marga, Badan Permusyawaratan Desa, LKMD
145	Administrasi Desa / Kelurahan : Monografi, Peta Rupa Bumi dll

146	Kewilayahan
146.1	Pembentukan Desa / Kelurahan
146.2	Pemekaran Desa / Kelurahan
146.3	Perubahan dan Perluasan Batas Wilayah Desa / Kelurahan
146.4	Perubahan Nama Desa / Kelurahan
146.5	Permasalahan Batas Desa / Kelurahan
146.6	Penyatuan Desa / Kelurahan
146.7	Penghapusan Desa / Kelurahan
147	Lembaga- Lembaga Tingkat Desa
148	Perangkatan Kelurahan
148.1	Kepala Kelurahan
148.2	Sekretaris Kelurahan
148.3	Staf Kelurahan
149	Dewan Kelurahan
149.1	Rukun Tetengga
149.2	Rukun Warga
149.3	Rukun Kampung
113.0	Randit Rampung
150	MPR / DPR / DPD
151	Keanggotaan MPR
151.1	Pencalonan
151.2	Pemberhentian
151.3	Recall
151.3.1	Meninggal
151.4	Pelanggaran
151.5	Pergantian antar Waktu
152	Persidangan
153	Kesejahteraan
153.1	Keuangan
153.2	Penghargaan
154	Hak
155	
100	Keanggotaan DPR pencalonan pengangkatan
	Persidangan, Sidang Pleno, Dengar Pendapat/Rapat Koordinasi
156	Reses
157	Kesejahteraan
158	Jawaban Pemerintah
159	Hak
160	DPRD TK. I PROVINSI
161	Keanggotaan
161.1	Pencalonan
161.2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
161.3	Pelanggaran
161.4	Pemberhentian Antar Waktu
161.41	Meninggal Dunia
161.42	Mengundurkan Diri
161.43	Diberhentikan
161.5	Alat Kelengkapan Dewan
161.51	Pimpinan
161.52	Badan Musyawarah
161.53	Komisi
161.54	Badan Legislasi Daerah

161.55	Badan Anggaran
161.56	Badan Kehormatan
161.57	Alat Kelengkapan lain (pansus)
162	Persidangan
162.1	Rapat-rapat
162.11	Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa
162.12	Rapat Pimpinan DPRD
162.13	Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat
	Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus
162.14	Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi
162.15	Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat
	Umum, Rapat Pemandangan Umum
162.16	Rapat Fraksi
162.2	Fraksi
162.3	Tata Tertip
162.4	Kode Etik
162.5	Reses
162.6	Peninjauan / Kunjungan Lapangan
162.7	Kunjungan Kerja / Study Banding / Konsultasi
163	Kesejahteraan
163.1	Keuangan
163.2	Penghargaan
164	Hak
165	Sekretaris DPRD Provinsi
166	
167	
168	
169	
170	DPRD KABUPATEN / KOTA
171	Keanggotaan
171.1	Pencalonan
171.2	Pengangkatan
171.3	Pemberhentian
171.4	Recall
171.5	Pelanggaran
172	Persidangan
173	Kesejahteraan
173.1	Keuangan
173.2	Penghargaan
174	Hak
175	Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota
176	
177	
178	
179	
180	HUKUM
180.1	Konstitusi
180.1	Dasar Hukum
180.11	Undang-Undang Dasar
180.12.2	마실 마실시 경기 수 있는데 그는
	Amnesti, Abosili dan Grasi
100.12.3	Amnesti, Abostii dan Grasi

180.13	Peraturan Pemerintah
180.14	Keppres / Perpres / Inpres
180.15	Kepmen / Permen / Inmen
180.16	Perundangan tingkat Provinsi meliputi Perda, Kepgub / Pergub /
100.10	Ingub
180.17	Perundangan Tingkat Kabupaten/Kota meliputi Perda,
100.11	KepBup/KepWal, PerBup/PerWal
180.18	Perundangan Tingkat Desa meliputi Peraturan Desa, Keputusan
	Kepala Desa
181	Perdata
181.1	Tanah
181.2	Rumah
181.3	Utang/Piutang
181.31	Gadai
181.32	Hipotik
182	Pidana
182.1	Tindak Pidana Umum
182.2	
183	Peradilan
183.1	Jenis-jenis Peradilan
	Peradilan Umum
	Peradilan Negeri Tingkat Pertama
	Peradilan Tinggi
183.16	Peradilan Hak Asasi Manusia
183.2	Upaya Hukum
183.21	Banding
183.22	Kasasi
	Derden Verset
	Peninjauan Kembali
183.25	Grasi, Amnesti, Abolisi
183.3	Eksekusi
183.4	HERNELD CHECK TO ECONOMIC TO SELECTED THE CONTROL OF STREET CONTROL OF STREET CONTROL SERVICE STREET CONTROL CONTROL SERVICE STREET CONTROL CONTRO
	Pembinaan Hukum meliputi Kadarkum
183.5 184	Bantuan Hukum meliputi LBH Hukum Internasional
185	Imigrasi
185.1	Visa
185.2	Paspor
185.3	Exit
185.4	Reentry
185.5	Lintas Batas/Batas Antar Negara
186	Kepenjaraan
186.1	Registrasi Narapidana
186.2	Pembinaan Narapidana
186.3	Pembebasan Narapidana
186.4	Tahanan Titipan
187	Kejaksaan
187.1	Penuntutan Umum
187.2	Penuntutan Khusus
188	Peraturan Perundang-Undangan
188.1	TAP MPR
188.3	Undang-Undang Dasar
188.3	Peraturan
188.3.31	
	Peraturan Menteri
188 3 33	Peraturan Lembaga Non Departemen

188.3.33 Peraturan Lembaga Non Departemen

188.3.34	Peraturan Daerah
.341	Peraturan Provinsi
.342	Peraturan Kabupaten/Kota
.342.4	Keputusan
.342.41	Presiden
.342.42	Menteri
.342.43	Lembaga Non Departemen
.342.44	Gubernur
.342.45	(1) [2] [2] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4
.45.5	Instruksi
.45.51	Presiden
	Menteri
	Lembaga Non Departemen
	Gubernur
.45.55	[1878] [14] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [15
189	Hukum Adat
189.1	Tokoh Adat/Masyarakat
190	HUBUNGAN LUAR NEGERI
191	Powwakilan Asina
191	Perwakilan Asing
192	Tamu Negara Kerjasama dengan Negara Asing
193	Perwakilan RI di Luar Negeri
195	PBB
196	Laporan Luar Negeri
197	Hutang Luar Negeri
198	
199	
	and polymer
	200 POLITIK
	Perincian Ketiga
201	Kebijaksanaan Umum
202	Orde Baru
203	Reformasi
204	
205	
206	
207	
208	
209	
210	KEPARTAIAN
211	Lambana Partai
211	Lambang Partai Kartu Tanda anggota
212	Bantuan Keuangan Parpol
213	
215	
216	
217	发动的复数形式是包括的
218	
219	

220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN
221	Bedasarkan Perjuangan
221.1	Perintis Kemerdekaan
221.2	Angkatan 45
221.3	Veteran
222	Bedasarkan Kekayaan
222.1	PEPABRI
222.2	Wredatama
223	Bedasarkan Kerohanian
224	Lembaga adat
225	Lembaga Swadaya Masyarakat
226	
227	
228	
229	
230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
231	Ikatan Dokter Indonesia
232	PGRI
233	Persatuan Sarjana Hukum Indonesia
234	Persatuan Advokat Indonesia
235	Lembaga Bantuan Hukum
236	Korp. Pegawai RI
237	Persatuan Wartawan Indonesia
238	Persatun Cendikiawan Muslim Indonesia
239	Organisasi Profesi dan fungsional Lainnya
240	ORGANISASI PEMUDA
241	Komite Nasional Pemuda Indonesia
242	Organisasi Mahasiswa
243	Organisasi Pelajar
244	Gerakan Pemuda Ansor
245	Gerakan Pemuda Islam Indonesia
246	Gerakan Pemuda Marhaenis
247	
248	
249	
250	ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN
251	Federasi Buruh Seluruh Indonesia
252	Organisasi Buruh Internasional
253	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
254	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
255	Keluarga Sopir Proporsional Indonesia
256	
257	
258	
259	

260	ORGANISASI WANITA
261	Dharma Wanita
262	Kongres Wanita Indonesia
263	Persatuan Wanita Republik Indonesia
264	Pemberdayaan Perempuan (Wanita)
265	
266	
267	
268	
269	
270	PEMILU (PEMILIHAN UMUM), PILKADA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH)
271	Pencalonan
272	Nomor Urut / Tanda Gambar
273	Kampanye
273.1	Dana Kampanye
274	Petugas Pemilu
275	Pemilih / Daftar Pemilih
276	Sarana
276.1	TPS
276.2	Kendaraan
276.3	Surat Suara
276.4	Kotak Suara
276.5	Dana
277	Pemungutan Suara / Penghitungan Suara
278	Penetapan Hasil Pemilu
278.1	Penetapan Terpilih dan pembagian kursi anggota legislativ
278.2	Penetapan Semenang pilkada
279	Penetapan Peroleha Jumlah Kursi dan Calon Terpilih
280	Pengucapa Sumpah Janji MPR,DPR, DPD
281	Pemantauan
282	Pelanggaran
283	Sengketa
284	Panwaslu
285	
286	
287	
288	
289	
290	
291	
292	
293	
294	
295	
296	
297	
298	
299	

300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
300.1	Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan
300.2	Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan
300.3	Pencegahan dan penanggulangan gangguan / ancaman
500.5	keamanan/ketertiban umum
300.4	Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan
301	Keamanan
302	Ketertiban
303	Penegakan pelaksanaan perda
304	Pembinaan / Penyuluhan Pelanggaran Perda
305	Patroli Wilayah
306	Laporan Kunjungan VIP, VVIP, tamu asing
306.1	Pengamanan
306.2	Pengawalan
307	Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi
	pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan
308	
309	
310	PERTAHANAN
311	Darat
312	Laut
313	Udara
314	Perbatasan
315	Ketahanan Ekonomi
316	Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
317	Ketahanan Bangsa
318	
319	
320	KEMELITERAN
321	Latihan Militer
322	Wajib militer
323	Operasi militer
324	Kekaryaan TNI Pejabat Sipil dari TNI
324.1	TMD
325	Kemanunggalan TNI dengan rakyat
326	
327	
328	
329	
330	KEAMANAN
331	Kepolisian
331.1	Polisi Pamong Praja
331.2	Kamra
331.3	Kamling
331.4	Jaga Wana
332	Huru hara/Demonstrasi
333	Senjata Api/Tajam



334	Bahan Peledak
335	Perjudian
336	Surat-surat kaleng
337	Pengaduan Masyarakat
338	Himbauan/Larangan
339	Teroris
340	PERTAHANAN SIPIL
341	Perlindungan Sipil
342	
343	
344	
345	
346	
347	
348	
349	
350	KEJAHATAN
351	Makar/Pemberontakan/Terorisme
352	Pembunuhan
353	Penganiyaan/Pencurian/Perampasan
354	Subversi/Penyeludupan/Narkotika
355	Pemalsuan
356	Korupsi/Penyelewengan/Penyalahgunaan Jabatan
357	Perkosaan Perbuatan Cabul
357.1	Pelaporan
357.2	Penanganan Korban
358	Kenakalan
359	Kejahatan Lainnya (Traficking, hipnotis, dll)
360	BENCANA
360.1	Pelatihan
360.2	Surat Keputusan
360.3	Berita Acara
361	Gunung Merapi/Gempa
362	Banjir/Tanah longsor
363	Angin Topan
364	Kebakaran
364.1	Pemadam Kebakaran
365	Kekeringan
366	Tsunami
367	Koordinasi/unsur pengarah Penanggulangan Bencana
368	MOU Pemerintah Pusat BNPB
369	Posko Bencana
370	KECELAKAAN / SAR
371	Darat
372	Udara
373	Laut
374	Sungai/Dangu

375	Latihan Keterampilan Penyelamatan di air dan menyelam
376	Latihan keterampilan pemadam kebakaran
377	Latihan Managemen bagi Pejabat
378	Investigasi/Penyelidikan kecelakaan
379	Asuransi kecelakaan
380	Pendampingan Rehabilitas dan Rekonstruksi
381	Perencanaan
381.1	Perencanaan Teknis
381.2	Rekomendasi
382	Bantuan Bencana
383	Penanggulangan Bencana dengan pihak lain
384	Sarana prasara rehabilitasi dan rekonstruksi
385	PUSDALOPS
386	Kunjungan lapangan
387	Relawan
388	Laporan bencana
390	Kerjasama BPBD Dengan Instansi Lain
391	Instansi pemerintah pusat
392	Instansi pemerintah di daerah
393	Lembaga International
394	Lembaga non pemerintah nasional
395	
396	
397	
398	
399	
	400
	400 KESEJAHTERAAN RAKYAT
	400 KESEJAHTERAAN RAKYAT Perincian Ketiga
401	
401 402	Perincian Ketiga
	Perincian Ketiga Keluarga Miskin
402	Perincian Ketiga Keluarga Miskin
402 403 404 405	Perincian Ketiga Keluarga Miskin
402 403 404 405 406	Perincian Ketiga Keluarga Miskin
402 403 404 405 406 407	Perincian Ketiga Keluarga Miskin
402 403 404 405 406 407 408	Perincian Ketiga Keluarga Miskin
402 403 404 405 406 407	Perincian Ketiga Keluarga Miskin
402 403 404 405 406 407 408 409	Reluarga Miskin PNPM Mandiri Pedesaan
402 403 404 405 406 407 408	Perincian Ketiga Keluarga Miskin
402 403 404 405 406 407 408 409	Perincian Ketiga Keluarga Miskin PNPM Mandiri Pedesaan
402 403 404 405 406 407 408 409	Reluarga Miskin PNPM Mandiri Pedesaan
402 403 404 405 406 407 408 409 410	Reluarga Miskin PNPM Mandiri Pedesaan
402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 411.1	Reluarga Miskin PNPM Mandiri Pedesaan PEMBANGUNAN DESA Usaha Gotong royong Swadaya Gotong royong Penataan Gotong Royong
402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 411.11	Reluarga Miskin PNPM Mandiri Pedesaan
402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 411.1 411.11 411.12	Reluarga Miskin PNPM Mandiri Pedesaan
402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 411.11 411.11 411.12 411.13	Reluarga Miskin PNPM Mandiri Pedesaan
402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 411.11 411.11 411.12 411.13 411.14	Reluarga Miskin PNPM Mandiri Pedesaan
402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 411.1 411.11 411.12 411.13 411.14 411.2	Reluarga Miskin PNPM Mandiri Pedesaan
402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 411.1 411.1 411.12 411.13 411.14 411.2 411.21	Reluarga Miskin PNPM Mandiri Pedesaan
402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 411.11 411.12 411.13 411.14 411.2 411.21 411.21	Reluarga Miskin PNPM Mandiri Pedesaan

411.4	Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK)
411.5	Penyuluhan Masyarakat Desa
411.6	Kelembagaan Desa
411.61	Kelompok Tani
411.62	Rukun Tani
411.63	Subak
411.64	Dharma Tirta
412	Perekonomian Desa
412.1	Produksi Desa
412.11	Pengolahan
412.12	Pemasaran
412.2	Keuangan Desa
412.21	Inventarisasi Data
412.22	Petunjuk/Pembinaan Pelaksanaan
412.23	Pelaksanaan dan Perkembangan Pembangunan
412.24	Bantuan/Stimulasi
412.25	Perkreditan Desa
412.26	Pelaporan
412.27	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan
	(PNPM-MP)
412.3	Koperasi Desa
412.31	Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
412.32	Koperasi Usah Desa (KUD)
412.4	Penataan Bantuan Pembngunan Desa
412.5	Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
412.6	Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa
413	Prasarana Desa
413.2	Pemukiman Kembali penduduk
413.3	Masyarakat Pradesa
413.4	Pemugaran perumahan dan lingkungan Desa
413.41	Rumah Sehat
413.42	Proyek Perintis
413.43	Pelaksanaan
413.44	Pengembangan
413.45	Perbaikan Kampung
414	Pengembangan Desa
414.1	Tingkat Perkembangan Desa
414.11	Jumlah Desa
414.12	Pemekaran Desa
414.13	Pembentukan Desa Baru
414.14	Evaluasi
414.15	Bagan
414.2	Unit Desa Pembangunan (UDKP)
414.21	Penyuluhan Program
414.22	Lokasi UDKP
414.23	Pelaksanaan
414.24	Bimbingan/Pembinaan
414.25	Evaluasi
414.3	Tata Desa
414.31	Inventarisasi
414.32	
414.33	Apikasi Tata desa
414.34	Pemetaan
414.35	Pedoman Pelaksanaan
414.36	Evaluasi

414.4	Perlombaan Desa
414.41	Pedoman
414.42	Penilaian
414.43	Kejuaraan
414.44	Piagam
415	Koordinasi
416	
417	
418	
419	
420	PENDIDIKAN
420.1	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk pendidikan
420.2	Pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa
	nasionalisme dsb
420.3	Pendidikan Kemasyarakatan
421	Sekolah
421.1	Pra sekolah (PAUD, Playgroup)
421.2	Sekolah Dasar
421.3	Sekolah Menengah
421.4	Sekolah Kejuruan
421.5	Perguruan Tinggi (Sekolah Tinggi, Akademi, Universitas, dll)
421.6	Kegiatan Sekolah meliputi Dies Natalis, Lustrum
421.7	Kegiatan Pelajar diantaranya Reuni, Darmawisata, Widyawisata
	lomba-lomba (LKS, Olimpiade Sains, Olimpiade Olah Raga dan
	Sains), Pelajar Teladan, Pertukaran Pelajar
421.8	Sekolah Pendidikan Luar Biasa
421.9	Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf
422	Administrasi Sekolah
422.1	Persyaratan masuk sekolah, testing, ujian, OSPEK
422.2	Tahun Pelajaran
422.3	Hari Libur
422.4	Uang Sekolah, diantaranya SPP, SPI
422.5	Bea Siswa dan Penghargaan Siswa Berprestasi
422.6	Ijazah, Sertifikat
422.7	Bantuan Pendidikan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
	Bantuan Khusus Murid (BKM), Bantuan Siswa Miskin (BSM)
423	Metode Belajar
423.1	Kuliah
423.2	Ceramah, Simposium, Seminar
423.3	Diskusi
423.4	Kuliah Lapangan, KKN, Magang/Praktek/PKL
423.5	Kurikulum
423.6	Karya Tulis, Karya Ilmiah
423.7	Ujian
424	Tenaga Pengajar
424.1	Pertukaran Guru ke Luar Negeri
424.2	Sertifikasi Guru
425	Sarana Pendidikan
425.1	Bangunan Pendidikan
	Gedung Sekolah
	Kampus
425.13	Pusat Kegiatan
425.14	Perpustakaan

105 15	
	Laboratorium
425.2	Buku
425.3	Perlengkapan Pendidikan
425.4	Sistem Informasi Pendidikan
425.5	Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan
426	KEOLAHRAGAAN
426.1	Cabang Olahraga
426.11	Olah raga Prestasi (PON, Sea Games, Kejurnas, Olympiade)
426.12	Olah raga Pendidikan (POPDA SD, Porseni dll)
426.13	Olah raga Rekreasi / Massal (Senam, sepeda santai, olahraga tradisional)
426.14	Iptek dan Industri Olah raga
426.2	Sarana
426.21	Gedung Olahraga
426.22	Stadion
46.23	Lapangan
426.24	Kolam Renang
426.243	Pesta Olahraga : PON, Porsade, Olimpiade, dsb
426.244	KONI
427	KEPEMUDAAN
427.1	Pertukaran Pemuda
427.2	Paskibraka
427.3	Sarana Prasarana Kepemudaan, meliputi sarana kegiatan
	remaja : gelanggang remaja
427.4	Kemitraan Pemuda
427.5	Karang Taruna
428	Kepramukaan
429	Pendidikan Kedinasan
430	KEBUDAYAAN
431	Kesenian
431.1	Cabang Kesenian (Seni Pewayangan, seni tari, seni musik, seni
	rupa, seni lukis dll)
431.2	Sarana
431.21	Gedung Kesenian
431.22	Padepokan
431.23	Lembaga Adat
431.24	Kegiatan adat/tradisi
431.3	Usaha pertunjukan, hiburan, kesenangan : Festival , pentas seni
432	Kepurbakalaan
432.1	Museum
432.2	Peninggalan Kuno
432.21	Candi, termasuk pemugaran
432.22	Benda
433	Sejarah
434	Bahasa
435	Pertunjukan, Hiburan
436	Kepercayaan
437	# 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
	# 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

440	KESEHATAN
440.1	Kebijakan dan program pemerintah untuk kesehatan
441	Pembinaan Kesehatan
441.1	Gigi
441.2	Mata
441.3	Jiwa
441.4	Kanker
441.5	UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
441.6	Perawatan
441.7	Kesehatan Masyarakat meliputi PKM, Pemberdayaan Kesehatan
	Masyarakat melalui media PKK, Posyandu, dsb
441.8	Pekan Imunisasi Nasional
441.9	JPSBK (Jaminan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan)
441.91	JAMKESMAS
441.92	JAMKESDA
441.93	JAMPERSAL
441.94	Jaminan lainnya
442	Obat-obatan
442.1	Pengadaan
442.2	Pemeriksaan Obat
442.3	Penyimpanan Obat
442.4	Distribusi obat
442.5	Pengawasan Obat
442.51	Obat Generik
442.52	Obat Terlarang
442.53	Pemalsuan Obat
443	Penyakit Menular
443.1	Pencegahan Penyakit
443.2	Pemberantasan Penyakit Menular langsung (P.2.M.L)
443.21	Kusta
443.22	
443.23	
443.24	
443.25	Kolera
443.26 443.3	SARS, dan jenis penyakit lainnya Epidemiologi dan Karantina (Epidka)
443.31	Epiaemiologi aan Karantina (Еріака) Kholera
443.32	내가 있는 마음을 하는 것이 되었다. 그는 사람들은 사람들이 하는 사람들이 되었다. 그는 사람들이 되었다. 그는 사람들이 되었다. 그는 사람들이 살아내는 사람들이 되었다. 그리는 사람들이 없는 사람들이 없는 사람들이 되었다.
443.33	
443.34	
443.4	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
443.41	Malaria
443.42	Dengue Heemorrhagie Fever (DHF)
443.43	
443.44	보기에 하게 되었다면 하는데 이 마음을 하는데 되었다면 그는 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 아니는 그는 사람들은 그는 사람들은 그를 모르는 것을 받는다면 모든데
443.45	
443.46	그렇게 하는 사람들이 살아왔다면 하는데 하는데 나는 사람들이 얼마나 되었다면 하는데 그 나는 사람들이 되었다면 하는데 얼마나 되었다면 하는데 없는데 얼마나 없었다.
443.47	
443.48	
443.49	
	Penyakit Lainya
443.5	Epidemiology dan Karantina (Epidka)
443.51	
443.52	Surveilanse



443.53	Pestisida
443.54	Pencemaran udara
443.55	Jamban Keluarga
443.56	Kesehatan Institusi
443.6	Higiene sanitasi
443.61	Tempat-tempat pembuatan dan penjualan makanan minuman
	(TPPMM), jasa boga
443.62	Sarana air minum
443.63	Pestisida, insektisida
443.64	Pencemaran
443.65	Jamban keluarga, Sanitasi rumah tangga
443.66	Kesehatan institusi, Misal : Poskestren, Sanitasi masjid dll
443.67	Higiene sanitasi CA. Mammae
443.68	Higiene sanitasi CA. Hepar
443.69	Higiene sanitasi CA. Paru
443.7	Kejadian khusus
443.71	Dekopensatiokordosis (Serangan jantung)
443.72	Asma
443.73	Psikosis
443.74	PPOM
443.75	Kecelakaan Lalu Lintas
443.76	Kejadian Luar Biasa (KLB)
444	Gizi
444.1	Kekurangan Makanan
444.2	Bahaya kelaparan, busung lapar ,gizi busuk
444.3	Keracunan Makanan
444.4	Menu makanan rakyat
444.5	Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD)
444.6	Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
444.7	Gondok endemic (GAKI)
445	Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas keliling
445.1	Pelayanan Medis (Termasuk surat keterangan berkaitan dengan
	kondisis pasien, visum)
445.11	Rawat Inap
445.12	Rawat Jalan
445.13	IGD
445.14	IBS
445.15	ICU
445.16	MCU (Medical Check Up)
445.2	Penunjang Medis
445.21	Farmasi
445.22	Rekam Medik
445.23	Radiologi
445.24	Gizi
445.25	Laboratorium Klinik
445.26	Laboratorium Patologi Anatomi, Forensik
445.27	Bank Daerah Rumah Sakit
445.28	Sanitasi Rumah Sakit
445.29	CSSD / Laundry
445.3	Keperawatan Kemita Medik
445.4	Komite Medik
445.5	SPI (Satuan Pengawas Internal) Mutu Rumah Sakit
445.61 445.61	Akreditasi
445.62	ISO
173.02	150

445.63	PSBH (Problem Solving For Better Hospital)
445.64	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
445.7	IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)
445.8	Promosi Layanan Kesehatan
445.9	Kasus Hukum Rumah Sakit
446	Tenaga Medis
446.1	Perencanaan Tenaga Medis
446.2	Pendayagunaan Tenaga Medis
446.21	Perijinan Untuk Tenaga Medis
446.22	Kegiatan Bhakti Sosial Tenaga Medis
446.23	TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia)
446.3	Diklat Tenaga Kesehatan / Medis
446.4	Diklat Tenaga Kesehatan / Para Medis
446.5	Pendidikan di Bidang Kesehatan Termasuk Pendidikan
	Spesialis
447	Alat Medis
447.1	Standarisasi
447.2	Penyimpanan
447.3	Distribusi
447.4	Perijinan Berkaitan Dengan Alat Kesehatan
448	Pengobatan Tradisionil
448.1	Pijat
448.2	Akupuntur
448.3	Jamu dan Herbal
448.4	Dukun/Paranormal
449	Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan
449.1	PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling
449.2	Poliklinik dan Balai Kesehatan
449.3	Rumah Bersalin
449.4	Posyandu
449.5	Laboratorium Kesehatan
449.6	Apotik
449.7	Sanatorium Kesehatan
450	AGAMA
451	Islam
451.1	Peribadatan
451.11	
451.12	Zakat,Infaq, Shodaqoh
451.13	Puasa
451.14	Umroh dan Haji
415.15	MTQ
451.2	Rumah Ibadah (Masjid, Musholla,Surau)
451.3	Tokoh Agama
451.4	Pendidikan Agama
451.41	Pendidikan Tinggi Agama
451.42	Menengah , MTs, MA
451.43	Dasar, Pra Sekolah,MI
451.44	Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ/ Madrasah Diniyah,
	Pondok Pesantren dll)
451.45	
451.46	Sarana Pendidikan Meliputi Buku, Gedung Sekolah dll
	Sarana Pendidikan Meliputi Buku,Gedung Sekolah dll Tenaga Pengajar
451.46	Sarana Pendidikan Meliputi Buku,Gedung Sekolah dll Tenaga Pengajar Buku

451.49	Organisasi/Lembaga Pendidikan
451.5	Wakaf
451.6	Mazhab Agama Islam
451.7	Organisasi Keagamaan bukan politik (Majelis Ulama Indonesia,
	Dewan Hisab Rukyat dll)
451.8	Tokoh Agama, Rohaniawan (Da'i)
452	Protestan
452.1	Peribadatan
452.2	Rumah Ibadah Gereja dll
452.3	Tokoh Agama, Rohaniawan (Pendeta, Domine dll)
452.4	Mazhab Agama Kristen Protestan
452.5	Organisasi Gereja
453	Khatolik
453.1	Peribadatan
453.2	Rumah Ibadah Gereja dll
453.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
453.4	Mazhab Agama Khatolik
453.5	Organisasi Gerejani
454	Hindu
454.1	Peribadatan
454.2	Rumah Ibadah Pura dll
454.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
454.4	Mazhab Agama Hindu
454.5	Organisasi Agama Hindu
455	Budha
455.1	Peribadatan
455.2	Rumah Ibadah Candi, Vihara dll
455.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
455.4	Mazhab Agama Budha
455.5	Organisasi Agama Budha
456	Urusan Haji
456.1	ONH
456.2	Manasik
457	Kong Hu Cu
457.1	Peribadatan
457.2	Rumah Ibadah Klenteng dll
457.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
457.4	Mazhab Agama Kong Hu Cu
457.5	Organisasi Agama Kong Hu Cu
458	
459	
460	SOSIAL
100	
461	Rehabilitasi penderita Cacat
461.1	Cacat Maat
461.2	Cacat Fisik
461.3	Cacat Mental
462	Tuna Sosial
462.1	Gelandangan/orang terlantar, anak jalanan
462.2	Pengemis
462.3	Tuna susila
462.4	Anak nakal
160 E	Tung suioma

Kesejahteraan anak / keluarga

462.5

463

Tuna wisma

463.1	Anak Putus Sekolah
463.11	Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA)
463.12	Perlindungan Anak
463.13	Anak Asuh
463.2	Ibu Teladan
463.21	Perlindungan Perempuan
463.22	Ibu Teladan
463.23	Pengarusutamaan Gender (PUG)
464	Pembinaa Kepahlawanan
464.1	Pahlawan meliputi Penghargaan kepada Pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan jandanya
464.2	Perintis kemerdekaan meliputi Pembinaan, Penghargaan dan Tunjangan kepada Perintis Kemerdekaan
464.3	Cacat Veteran
465	Kesejahteraan Sosial
465.1	Lanjut Usia
465.2	Korban Kekacauan, Pengungsian, Rehabilitasi
465.3	Masyarakat miskin: Raskin, BLT dll
466	Sumbangan sosial
466.1	Korban bencana
466.11	Jaminan sosial
466.2	Pencairan dana untuk sumbangan : Penyelenggaraan Undian,
	Ketangkasan, Bazar dsb
466.3	Panti Asuhan
466.4	Panti Jompo
467	Bimbingan Sosial
467.1	Masyarakat suku terasing meliputi : bimbingan pendidikan,
	kesehatan, pemukiman, Pembinaan Komunitas Adat Terpencil
	(PKAT) dan sebagainya
468	PMI
469	Makam
469.1	Umum
469.2	Pahlawan
469.3	Khusus Keluarga Raja
469.4	Krematorium
470	
470	KEPENDUDUKAN
470.1	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kependudukan
471	Pendaftaran Penduduk
471.1	Identitas Penduduk
471.11	Biodata
471.12	Nomor Induk Kependudukan
471.13	Kartu Tanda Penduduk
471.14	Kartu Keluarga
471.15	Advokasi Identitas Penduduk
471.2	Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia
471.21	Perpindahan Penduduk WNI
471.22	Perpindahan Penduduk WNA Dalam Wilayah Indonesia
471.23	Perpindahan Penduduk WNA dan WNI Tinggal Sementara
471.24	Daerah Terbelakang
471.25	Bedol Desa
471.3	Perpindahan Penduduk Antar Negara
471.31	Penduduk Indonesia Ke Luar Negeri
471.32	Orang Asing Tinggal Sementara

471.33	Orang Asing Tinggal Tetap
471.34	Perpindahan Penduduk Antar Negara di Wilayah Perbatasan
	Antar Negara (Pelintas Batas Tradisional)
471.4	Pendaftaran Pengungsi dan Penduduk Rentan
471.41	Akibat Bencana Alam
471.42	Akibat Kerusuhan Sosial
471.43	Pendaftaran Penduduk Daerah Terbelakang
471.44	Pendaftaran Penduduk Rentan
472	Pencatatan Sipil
472.1	Kelahiran Kematian dan Advokasi
472.11	Kelahiran
472.12	Kematian
472.13	Advokasi Kelahiran dan Kematian
472.2	Perkawinan Perceraian dan Advokasi
472.21	Perkawinan Agama Islam
472.22	Perkawinan Agama non Islam
472.23	Perceraian Agama Islam
472.24	Perceraian Agama non Islam
472.25	Advokasi
472.3	Pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta
	perubahan dan pembatalan akta dan advokasi
472.31	Pengangkatan anak
472.32	Pengakuan anak
472.33	Pengesahan anak
472.34	Perubahan akta
472.35	Pembatalan akta
472.36	Advokasi
472.4	Pencatatan Kewarganegaraan
472.41	Akibat perkawinan
472.42	Akibat kelahiran
472.43	Non Perkawinan/Non kelahiran
472.44	Non Kelahiran
472.45	Perubahan WNI ke WNA
473	Informasi Kependudukan
473.1	Teknlogi Informasi
473.11	Perngkat Keras
473.12	Perangkat lunk
473.13	Jaringan Komunikasi Data
473.2	Kelembagaan Sumber Daya Manusia
473.21	Daerah Maju
473.22	Daerah Berkembang
473.23	Daerah Terbelakang
473.3	Pengolahan Data Kependudukan
473.31	Pendaftaran Penduduk
473.32	Kejadian Vital penduduk
473.33	Penduduk non Regisrasi
473.4	Pelayanan Informasi Kependudukan
473.41	Media Elektronik
473.42	Media Cetak
473.43	Oulet Perkambangan Penduduk
474 474.1	Perkembangan Penduduk Pengarahan Kuantitas Penduduk
	Pengarahan Kuantitas Penduduk
474.11 474.12	Struktur Jumlah
474.12	Komposisi Fertilitas
774.13	Terminas 4

474.14	Kesehatan Reproduksi
474.15	Morbiditas Penduduk
474.16	Mortalitas Penduduk
474.2	Pengembangan Kuantitas Penduduk
474.21	Anak dan Remaja
474.22	Penduduk Usia Produktif
474.23	Penduduk Lanjut Usia
474.24	Gender
474.3	Penataan Persebaran Penduduk
474.31	Migrasi Antar Wilayah
474.32	Migrasi Internasional
474.33	Urbanisasi
474.34	Sementara
474.35	Migrasi Non Permanen
474.4	Perlindungan Pemberdayaan Penduduk
474.41	Pengembangan Sistem Pelindungan Penduduk
474.42	Pelayanan Kelembagaan Ekonomi
474.43	Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya
474.44	Partisipasi Masyarakat
474.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan
474.51	Pendidikan Jalur Sekolah
474.52	Pendidikan Jalur Luar Sekolah
474.53	Pendidikan Jalur Masyarakat
474.54	Pembangunan Berwawasan Kependudukan
475	Proyeksi Dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan
475.1	Indikator Kependudukan
,,0.1	Perumusan Penetapan Dan Pengembangan Indikator
475.11	Kependudukan
475.12	Pemanfaatan Indikator Kependudukan
475.13	Sosialisasi Indikator Kependudukan
475.2	Proyeksi Kependudukan
475.21	Penyusunan Dan Pengembangan Proyeksi Kependudukan
475.22	Pemanfaatan Proyeksi Kependudukan
475.3	Analisis Dampak Kependudukan
475.31	Penyusunan Dan Pengembangan
475.32	Pemanfaatan Analisis Dampak Kependudukan
475.4	Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah
475.41	Lembaga Internasioanal
475.42	
475.43	Lembaga Masyarakat Dan Nirlaba
475.5	Lembaga Usaha Swasta
475.51	Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah
	Lembaga Pemerintah
475.52	Pemerintah Provinsi dan Kota
475.53	Pemerintah Kabupaten
475.6	Analisis
476	Monitoring
477	Evaluasi
478	
479	
480	MEDIA MASSA
481	Penerbitan
481.1	Surat kabar
481.2	Majalah
101.2	mujuut

481.3	Buku
481.4	Penerjemahan
481.5	Press Release, Klarifikasi Berita, Press Statistik
481.51	Perindustrian Perdagangan termasuk 9 harga pokok
481.52	Perekonomian dan Perbankan
481.53	Bidang lainnya
481.7	Masukan Analisis Gubernur
482	Radio
483	Televisi
484	Film
485	Pers
485.1	Kewartawanan
485.2	Wawancara
485.3	Informasi Nasional
486	Grafika
487	Penerangan
488	Operasion Room
489	Hubungan Masyarakat
490	Pengaduan Masarakat
491	
492	
493	
494	
495	
496	
497	
498	
100	
499	
499	500 PEREKONOMIAN
499	500 PEREKONOMIAN
499	500 PEREKONOMIAN Perincian Ketiga
	Perincian Ketiga
501	Perincian Ketiga Pengadaan Pangan
501 502	Perincian Ketiga Pengadaan Pangan Pengadaan Sandang
501 502 503	Perincian Ketiga Pengadaan Pangan
501 502 503 504	Perincian Ketiga Pengadaan Pangan Pengadaan Sandang
501 502 503	Perincian Ketiga Pengadaan Pangan Pengadaan Sandang
501 502 503 504	Perincian Ketiga Pengadaan Pangan Pengadaan Sandang
501 502 503 504 505	Perincian Ketiga Pengadaan Pangan Pengadaan Sandang
501 502 503 504 505 506	Perincian Ketiga Pengadaan Pangan Pengadaan Sandang
501 502 503 504 505 506 507	Perincian Ketiga Pengadaan Pangan Pengadaan Sandang
501 502 503 504 505 506 507 508 509	Perincian Ketiga Pengadaan Pangan Pengadaan Sandang Perizinan
501 502 503 504 505 506 507 508	Perincian Ketiga Pengadaan Pangan Pengadaan Sandang
501 502 503 504 505 506 507 508 509	Pengadaan Pangan Pengadaan Sandang Perizinan
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510	Pengadaan Pangan Pengadaan Sandang Perizinan
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 510.1 510.11	Pengadaan Pangan Pengadaan Sandang Perizinan
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 510.1 510.11 510.12	Pengadaan Pangan Pengadaan Sandang Perizinan
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 510.1 510.11 510.12 510.13	Pengadaan Pangan Pengadaan Sandang Perizinan
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 510.1 510.11 510.12 510.13 510.2	Perincian Ketiga Pengadaan Pangan Pengadaan Sandang Perizinan PERDAGANGAN Promosi Perdagangan Pekan Raya Iklan Pameran Pelelangan, Distribusi
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 510.1 510.11 510.12 510.13 510.2 510.3	Perincian Ketiga Pengadaan Pangan Pengadaan Sandang Perizinan PERDAGANGAN Promosi Perdagangan Pekan Raya Iklan Pameran Pelelangan, Distribusi Tera
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 510.1 510.11 510.12 510.13 510.2 510.3 510.14	Pengadaan Pangan Pengadaan Sandang Perizinan PERDAGANGAN Promosi Perdagangan Pekan Raya Iklan Pameran Pelelangan, Distribusi Tera Event-event
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 510.1 510.11 510.12 510.13 510.2 510.3 510.14 510.15	Pengadaan Pangan Pengadaan Sandang Perizinan
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 510.1 510.11 510.12 510.13 510.2 510.3 510.14	Pengadaan Pangan Pengadaan Sandang Perizinan PERDAGANGAN Promosi Perdagangan Pekan Raya Iklan Pameran Pelelangan, Distribusi Tera Event-event

510.18	Penentuan Harga Pokok
510.3	Bina usaha dan sarana Perdagangan
510.31	Rencana dan Program Kerja
510.32	Pelaksanaan Pelayanan administrasi
510.33	Pelaksanaan Teknis
510.34	Pemantauan
510.35	Evaluasi dan Pelaporan
510.4	Perijinan (HO, Gangguan, Reklame, dll)
510.41	Pernerbitan SIUP
510.42	Perpanjangan
510.43	Ijin Prinsip
510.44	Rekomendasi
510.5	Perdagngan antar pulau
510.51	Kerjasama bahan baku
510.52	Industri pemasaran
510.6	Tera
510.61	Tera dan Tera Ulang
510.62	Takaran
510.63	Timbangan dan Anak Timbangan
510.64	Kalibrasi
510.65	Cap Tanda Tera
510.66	Biaya tera
510.7	Bantuan Peralatan
510.71	Proposal
510.72	Surat Perjanjian / Kontrak
510.73	Serah Terima
510.8	Perijinan / Rekomendasi Tanda Pabrik
510.9	Kemetrologian
510.91	Standart Tingkat Tiga
510.92	Standart Kerja Satuan Ukuran
510.93	Ukuran Metrologi
	Peralatan
510.932	Laboratorium Metrologi Legal
510.933	Tanki Ukur Mobil
510.934	KWH Meter termasuk didalamnya listrik dan PDAM
510.935	SPBU
511	Pemasaran
511.1	Sembilan bahan pokok diantaranya beras, garam, minyak
	tanah, minyak goreng, sabun dll
511.2	Pasar
511.3	Pertokoan, kaki lima, kios
511.4	Pusat perbelanjaan
512	Ekspor
512.1	Ekspor Hasil Industri
512.2	Ijin Ekspor
512.3	Pengembangan Pasar Luar Negeri
512.4	Managemen Perdagangan Internasional
512.5	Eksport Hasil Industri
513	Impor
513.1	Ijin Impor
513.11	Pemberian ijin
513.12	Pengendalian ijin
513.4	Kegiatan Import
514	Perdagangan Antar Pulau
514.1	Kerjasama Bahan baku

514.2	Industri Pemasaran
515	Perdagangan Luar Negeri
515.1	Promosi dan Informasi
515.2	Pameran
515.3	Kerjasama
516	Pergudangan
516.1	Peti kemas
516.2	Tangki Penyimpanan
517	Aneka Usaha Perdagangan
518.1	Bina Usaha Koperasi
518.11	Koperasi Pertanian
518.12	Koperasi Non Pertanian
518.13	Permodalan Koperasi
518.131	Pemupukan Modal
	Pemanfaatan Modal
518.133	Perbankan dan Asuransi
518.134	Permodalan Luar Koperasi
518.135	Kredit Program Umum
518.136	Kredit Program Khusus
518.14	Distribusi dan Jasa Koperasi
518.141	Distribusi Bahan Pokok
518.142	Distribusi Aneka Bahan
	Distribusi Kerjasama Niaga
	Jasa Angkutan
	Jasa Perumahan
518.15	Koperasi Kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi
518.2	Bina Lembaga Koperasi
518.21	Organisasi Koperasi
518.211	Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi
518.212	Pemberian Badan Hukum Koperasi
	Penyelesaian Pembubaran Koperasi
	Keragaan Koperasi
	Pengakuan Koperasi Sekolah
	Amalgamasi
	Tertib Organisasi Koperasi
	Penyelesaian Penyelisihan/ Persengketaan
	Bimbingan Kesadaran Hukum
	Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi
	Rapat Anggota Tahunan Koperasi
	Pengurus dan Badan Pemeriksa
	Pengawasan Koperasi
518.261	Pengawasan Koperasi Primer
	Pengawasan Koperasi Sekunder
518.27	Penyuluhan Koperasi
	Pembinaan Kader Koperasi
	Masyarakat Umum
	Forum Komunikasi
	Kelompok Tani
	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PKKL)
	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
	Pembinaan Usaha
	Pembinaan Usaha Mikro
	Pembinaan Usaha Kecil
	Pembinaan Usaha Menengah
518.32	Pengawasan Usaha
	20

518.321	Pengawasan Usaha Mikro
	Pengawasan Usaha Kecil
	Pengawasan Usaha Menengah
519	
520	PERTANIAN
521	Tanaman Pangan
521.1	Program
521.11	Bimas/Inmas Termasuk Kredit
521.12	Penyuluhan
521.2	Produksi
521.21	Padi/Panen
521.22	B X 2000 X X X X X X X X X X X X X X X X
521.23	Jagung
521.24	Ketela Pohon
521.25	Hortikultura
521.26	
521.27	Tanaman Hias
521.28	Pembudidayaan Rumput Laut
521.3	Saran Usaha Pertanian
521.31	Peralatan Meliputi: Traktor Dan Peralatan Lainnya
521.33	Pembibitan
521.34	Pupuk
521.4	Perlindungan Tanaman
521.41	Penyakit, Penyakit Daun, Penyakit Batang
521.42	Hama, Serangga, Wereng, Walang Sangit, Tungru, Tikus Dan
	Sejenisnya
	Pemberantasan Hama Meliputi: Penyemprotan, Penyiangan,
521.43	Geropyokan, Sparayer, Pemberantasan Melalui Udara
521.44	Pestisida
521.5	Tanah Pertanian Pangan
521.51	Persawahan
521.52	Perladangan
521.53	Kebun
521.54	Rumpun Ikan Laut
521.55 521.6	KTA/Lahan Kritis Pengusaha Petani
521.7	이 그렇게 있는데 있다면 얼마가 되었다면 하는데 그가 모든데 하는데 얼마 없는데 얼마나 없는데 얼마를 하는데 되었다면 되었다면 없고 있는데 것이다.
521.71	Pasca Panen
521.72	Pemasaran Hasil
021.72	1 Chastran 11ttst
522	KEHUTANAN
522.1	Program
522.11	Hak Pengusahaan Hutan
522.12	Tata Guna Hutan
522.13	Perpetaan Hutan
522.14	Tumpangsari
522.2	Produksi
522.21	Kayu
522.22	Non Kayu
522.3	Sarana Usaha Kehutanan
522.4	Penghijauan, Reboisasi
522.5	Kelestarian
500 51	Casar Alam Marsa Catua Cuaka Marsa Catua

522.52	Berburu Meliputi Larangan Dan Ijin Berburu
522.53	Kebun Binatang
522.54	Konservasi Lahan
522.6	Penyakit/Hama
522.7	Jenis- Jenis Hutan
522.71	Hutan Hidup
522.72	Hutan Wisata
522.73	Huțan Produksi
522.74	Hutan Lindung
523	PERIKANAN
523.1	Rencana, Program, Stastistik, Prospek dan Pelaporan Bidang
	Perikanan dan Kelautan
523.11	Penyuluhan
523.12	Teknologi
523.2	Produksi Perikanan
	Pelelangan
523.22	Perikanan Budidaya : CBIB, CBIC
523.23	Sertifikasi Kesehatan Ikan
523.3	Usaha Perikanan
523.31	Pembibitan
523.32	Daerah Penangkapan
523.33	Pertambakan (Tambak ikan air deras, Tambak Udang dll)
523.34	Jaring Terapung
523.35	Pelatihan Nelayan
523.36	Pembinaan Wanita Nelayan
523.37	Fasilitas Perijinan : SIUP, SIPI , SKP
523.38	Perbenihan
523.4	Sarana
523.41	Peralatan
523.42	Kapal, Pelabuhan
523.5	Pengusaha
523.6	Nelayan
523.7	Sarana perikanan
523.61	Pelabuhan Perikanan Pantai
523.62	TPI/PPI
523.7	Pengendalian hama dan penyakit
523.71	Penyakit ikan
523.72	Hama ikan
523.673	Obat-obatan Termasuk Sertifikasinya
524	PETERNAKAN
524.1	Produksi
524.11	
524.12	
524.12 524.13	
524.13	를 받는데 있는데 NOTE 그 이번 전에 되었다면 바다 가는데 이번 전에 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 하는데 하는데 이번 모든데 되었다면 되었다면 되었다.
	Sarana Usaha Ternak
	Pembibitan
524.22	Kandang Ternak
524.23	Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
524.23	Budidaya
	Usaha Peternakan
047.40	Osuru I eterrunur

524.26	Pelayanan Usana
524.27	Pengolahan Hasil dan Pemasaran
524.28	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Peternakan
524.3	Kesehatan Hewan
524.31	Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan
524.32	Pos Kesehatan Hewan
524.33	Tesi Pullorum
524.34	
524.35	
524.36	3. [Hander Hander Hand
524.37	Pelayanan Kesehatan Hewan
524.4	Pelayanan Kesehatan Hewan
524.5	Pengembangan Ternak
524.51	Inseminasi Buatan
524.52	HEMICANIC MICHAEL MICHAEL MARCHES (M. C. L. C.
524.53	
524.6	Makanan Ternak
524.7	Tempat Pemotongan Hewan
524.8	Data Peternakan
324.0	Data Peternakan
525	PERKEBUNAN
525.1	Program dan Pelaporan
525.2	Produksi
525.21	
525.22	
525.23	
525.24	Tebu
525.25	Cengkeh
525.26	Kelapa/Kopra/Kelapa sawit
525.27	: [1] : [1]
525.28	
525.29	Jenis Tanaman yang lain
525.3	
525.31	Benih
525.32	Pembibitan
525.33	Kelompok Tani
525.34	Kemitraan
	Rekomendasi ijin usaha perkebunan
525.36	Pemasaran Hasil Perkebunan
525.4	Perlindungan Tanaman
525.41	
	Pestisida
525.43	Agensia Pengendalian Hayati
525.5	Alat dan Mesin Perkebunan
525.51	Power Sprayer
525.52	Hand Sprayer
525.53	Polibag
525.54	Alat Laboratorium Perkebunan
525.55	Reagen
525.56	Sarana/Alat Produksi Perkebunan
525.6	Pengolahan lahan
525.61	Terasering

525.7	Pemasyarakatan
525.71	Penyuluhan
525.72	Sosialisasi
525.73	Informasi
526	KETAHANAN PANGAN
526.1	Program Bimbingan Massal
526.2	Agribisnis
526.3	Mutu Hasil
526.31	Pengelola Hasil Pangan
526.32	Pemasaran Hasil
526.33	
526.4	Distribusi Pangan
526.41	Sistem dan pola Distribusi
526.42	Sarana dan Prasarana Distribusi
526.43	Pengadaan dan Cadangan Pangar
527	PENYULUHAN
527.1	Sumber Daya Manusia
527.11	Penyuluh
527.12	Pelaku Utama Pelaku Usaha
527.13	Stake holder
527.2	Kelembagaan
527.21	Struktural
527.22	Non Struktural
527.23	Pelaku Utama Pelaku Usaha
527.24	Lembaga Profesi
527.3 527.31	Penyelenggaraan Penyuluhan Program/ Metode
527.32	Promosi/Pameran/Kampanye
527.33	Penghargaan/Lomba
527.34	Materi
528	
529	
530	PERINDUSTRIAN
530.08	Undang-Undang Gangguan
531	Industri Logam
532	Industri Mesin/Elektronik
533	Industri Kimia/Farmasi
534	Industri Tekstil
535	Industri Makanan/minuman
536	Aneka Industri/Perusahaan
536.1	Home Industri
537	Aneka Kerajinan
537.1	Kerajinan Rakyat
538	Usaha Negara/BUMN
538.1	Perjan
538.2	Perum Persona / PT CV
538.3 539	Persero/PT, CV Perusahaan Daerah/BUMD/BULD
	THE THE PROPERTY OF THE PROPER

*

540	PERTAMBANGAN / KESAMUDRAAN
541	Minyak Bumi / Bensin
541.1	Pengusahaan
541.11	
	Rekomendasi
541.13	Kontrak Karya
541.2	
542	Gas Bumi
542.1	Eksloitasi/Pengeboran
	Kontrak Kerja
	Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
542.13	
542.14	
	Perijinan
	Rekomendasi
542.17	Energi Alternatif
542.18	Gas Rawa
542.2	Pengolahan ; Tangki, Pompa, Tanker
543	Aneka Tambang
543.1 543.2	
543.3	
543.4	Tembaga
543.5	Batu Bara
544	Logam Mulia, Emas, Intan, Perak
545	Logam
546	Geologi
546.1	Vulkanologi
546.11	에 많아버린 내용 내가게 오는 요즘이 되게 하면 있다. 그리고 있는데 전 1일 때문에 모든 1일 때문에 되었다.
546.2	Sumur Artesis, Air Bawah Tanah
547	Hidrologi
548	Kesamuderaan
549	Pesisir Pantai
550	PERHUBUNGAN
551	Perhubungan Darat
551.1	Lalu lintas jalan raya, sungai, danau
551.11	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu
	Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Keur)
	Kecelakaan Lalu Lintas
551.2	9
	Perizinan
	Terminal
	Alat Angkutan
	Jembatan Timbang/Lebih Muatan
551.25	
551.3	Angkutan Sungai Perizinan
	Perizinan Terminal
	Pelabuhan
551.4	
	Perizinan
551.42	

551.43	Pelabuhan
551.5	Feri
551.51	Perizinan
551.52	Terminal
551.53	Pelabuhan
551.6	Perkereta-Apian
552	Perhubungan Laut
552.1	Lalu Lintas Angkutan Laut, Pelayanan Umum
552.11	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
552.12	Pelayaran Dalam Negeri
552.13	Pelayaran Luar Negeri
552.2	Perkapalan Alat Angkutan
552.3	Pelabuhan
552.4	Pengerukan
552.5	Penjagaan Pantai
553	Perhubungan Udara
553.1	Lalu Lintas Udara / Keamanan Lalu Lintas Udara
553.2	Pelabuhan Udara
553.3	Alat Angkutan
554	POS
554.1	Pembinaan
554.2	Pelayanan
554.3	Perijinan
554.4	Gangguan Sarana dan Prasarana
555	Telekomunikasi
555.1	Telepon
555.2	Telegram
555.3	Telex / SSB, Faximile
555.4	Satelit, Internet
555.5	Kebijakan
555.6	Peralatan
	Radio Kumunikasi
555.8	
555.9	
555.10	대통령 (100 March 1988) 전 100 March (2010 Health 1984) Health (2010 Albert 1985) Health (2010 Albert 1985) Health
556	
556.1	
	Usaha Jasa Pariwisata
	Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata
	Restoran dan Rumah Makan
556.13	Ijin Usaha Obyek dan Atraksi Wisata Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata
556.14	
	Ijin Pariwisata Ijin Usaha Pariwasata
	Ijin Usaha Jasa Pariwisata
556.144	#####################################
	Ijin Pengusaha Objek dan Daya Tarik Wisata Ijin Usaha Sarana
556.15	Wisatawan
	Dalam Negeri
	Luar Negeri
	Perhotelan
	Status Hotel
	Kelas Hotel
556.22	

556.23 Tarif

556.3	Travel Service
556.4	Tempat Rekreasi
556.41	Obyek dan Daya Tarik Wisata
556.411	Ciptaan Tuhan
556.412	Hasil Karya Manusia
556.42	Rehabilitasi / Perawatan
556.43	Pengembangan Fasilitas
556.44	Tanah / Bangunan
556.45	Bina Usaha
556.46	Institusi
557	Metereologi
557.1	Ramalan Cuaca
557.2	Curah Hujan
557.3	Kemarau Panjang
557.4	Hujan Buatan
557.5	Peneropongan Bintang
558	
559	
560	TENAGA KERJA
560.1	Pengangguran
561	Upah
562	Penempatan Tenaga Kerja
563	Latihan Kerja
564	Tenaga Kerja
564.1	Butsi
564.2	Padat Karya
565	Perselisihan Perburuhan
566	Keselamatan Kerja
567	Pemutusan Hubungan Kerja
568	Kesejahteraan Buruh
569	Tenaga Kerja Asing
570	PERMODALAN
570.1	Penanaman Modal Dalam Negeri
570.2	Penanaman Modal Asing
571	Modal Domistik
572	Modal Asing
573	Modal Patungan/Penyertaaan Modal
574	Pasar Uang dan Modal
575	Saham
576	Belanja Modal
577	Modal Daerah
578	
579	
580	PERBANKAN / MONETER
F01	Vuodit
581	Kredit
582	Investasi
583	Deposito Bank Bombanaunan Daerah
584	Bank Pembangunan Daerah
585	Asuransi

585.1	Dana Kecelakaan Lalu Lintas
585.2	Polis
585.3	Premi
585.4	Tertanggung/Pemegang Polis
585.5	Uang Pertanggungan
586	Alat Pembayaran
587	Fiscal
588	Hutang Negara
589	Moneter
590	AGRARIA
591	Tata Guna Tanah
591.1	Pemetaan dan Pengukuran
591.2	Perpetaan
591.3	Penyediaan Data,Peta dan Publikasi
591.4	Fakta Tata Guna Tanah
591.5	Tanah Kritis
592	Landreform
592.1	Redistribusi
592.11	Pendaftaran Pemilik dan Pengurus Tanah Pertanian
592.12	Penentuan Tanah Objek Landreform
592.13	Pembagian Tanah Landreform
592.14	Sengketa Redistribusi Tanah Objek Landreform
592.2	Ganti Rugi
592.21	Ganti Rugi Tanah Kelebihan
592.22	Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan
592.23	Ganti Rugi Tanah Absentee
592.24	Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee
592.25	Ganti Rugi Tanah Partikelir
592.26	Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir
592.3	Bagi Hasil
592.31	Penetapan Timbangan Bagi Hasil
592.32	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
592.33	Sengketa Perjanjian Bagi Hasil
592.4	Gadai Tanah
592.41	Pendaftaran Pemilikan Dan Pengurusan
592.42	Pelaksanaan Gadai Tanah
592.43	Sengketa Gadai Tanah
592.5	Bimbingan dan Penyuluhan
592.6	Pengembangan
592.7	Yayasan Dana Landreform (YDL)
593	Pengurusan Hak Tanah
593.1	Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis
593.11	Sewa Tanah
593.12	Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu :
	Tebu, Tembakau, Rosela, Corchorus.
593.2	Hak Milik
593.21	Perorangan
593.22	Badan Hukum
593.3	Hak Pakai
593.31	Perorangan
593.311	Warga Negara Indonesia
593.312	Warga Negara Asing
593.32	Badan Hukum

593.321	Badan Hukum Indonesia
593.322	Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat Kantor Dagang Asing
593.33	Tanah Gedung-Gedung Negara
593.4	Guna Usaha
593.41	Perkebunan Besar
593.42	Perkebunan Rakyat
593.43	Peternakan
593.44	Perikanan
593.45	Kehutanan
593.5	Hak Guna Bangunan
593.51	Perorangan
593.52	Badan Hukum
593.53	P3MB (Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda)
593.54	Badan Hukum Asing Belanda-Prrk No 5165
593.55	Pemulihan Hak (Pen Pres 4/1960)
593.6	Hak Pengelolaan
593.61	PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate
593.62	Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
593.7	Sengketa Tanah
593.71	Peradilan Sengkta Tanah
593.8	Pencabutan dan Pembebasan Tanah
593.81	Pencabutan Hak
593.82	Pembebasan Tanah
593.83	Ganti Rugi Tanah
594	Pendaftaran Tanah
594.1	Pengukuran/ Pemetaan
594.11	Fotogrametri
594.12	Terristris
594.13	Triangulasi
594.14	Peralatan
594.2	Dana Pengukuran (Permen Agraria No.6/1960)
594.3	Sertifikat Point at Pombustan Alsta Tanah
594.4 595	Pejabat Pembuatan Akte Tanah
595.1	Transmigrasi Tataguna Tanah
595.2	Landreform
595.3	Pengurusan Hak-Hak Tanah
595.4	Pendaftaran Tanah
596	
597	
598	
599	
	600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAKERJAAN
	Perincian Ketiga
600	PEKERJAAN UMUM
601	Tata Bangunan Konstruksi
602	Kontraktor
602.1	Tender
602.2	Pennunjukan
602.3	Prakualifikasi
602.31	Daftar Rekanan Mampu (DRM)
602.32	Tanda Daftar Rekanan

603	Arsitektur
604	Bahan Bangunan
604.1	Tanah dan Batu
604.2	Aspal
604.3	Besi dan Logam Lainya
604.31	Besi Beton
604.32	Besi Profil (Konstruksi)
604.33	Paku
604.34	Alumunium , Profil
604.4	Bahan Bahan Perlindungan dan Pengawet (Cat, Tech, oil,
604 5	Pengawet Kayu)
604.5	Semen
604.6	Rayu Rahan Ranutun Atan
604.7	Bahan Penutup Atap
604.8	Alat Alat Penggantung dan Pengunci
604.9	Bahan Bahan Bangunan Lainya
605	Instalansi
605.1	Instalansi Bangunan
605.2	Instalansi Listrik
605.3	Instalansi Air / Sanitasi
605.4	Instalansi Pengatur Udara
605.5	Instalansi Akustik
605.6	Instalansi Cahaya / Penerangan
606	Konstruksi Pencegahan
606.1	Konstruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran
606.2	Terhadap Gempa
606.3	Terhadap Angin / Udara / Panas
606.4	Terhadap Kegaduhan
606.5	Terhadap Gas / Explosive
606.6	Terhadap Serangga
606.7	Terhadap Radiasi Atom
607	
608	
609	
610	PENGAIRAN
611	Irigasi
611.1	Bangunan Waduk
611.11	Bendungan
611.12	Tanggul
611.13	Pelimpahan banjir
611.14	Menara pengambilan
611.2	Bangunan Pengambilan
611.15	Pembangunan dermaga
611.2	Bangunan pengambilan
611.21	Bendungan
611.22	Bendungan dengan pintu bilas
611.23	Bendungan dengan pompa
611.24	Pengambilan bebas
611.25	Pengambilan bebas dengan pompa
611.26	Sumur dengan pompa
611.27	Kantung lumpur
611.28	Silf ekstretor
611.29	Escope Chenel

611.3 E	angunan	Pembawa
---------	---------	---------

- 611.31 Saluran
- 611.311 Saluran Induk
- 611.312 Saluran Sekunder
- 611.313 Suplesi
- 611.314 Tersier
- 611.315 Saluran Kwarter
- 611.316 Saluran Pasangan
- 611.317 Saluran Tertutup / Terowongan
- 611.32 Bangunan
- 611.321 Bangunan Bagi
- 611.322 Bangunan Bagi Dan Sadap
- 611.323 Bangunan Sadap
- 611.324 Bangunan Check
- 611.325 Bangunan Terjun
- 611.33 Box Tersier
- 611.34 Got Miring
- 611.35 Talang
- 611.36 Syphon
- 611.37 Gorong-Gorong
- 611.38 Pelimpah Samping
- 611.4 Bangunan Pembuangan
- 611.41 Saluran
- 611.411 Saluran Pembuang Induk
- 611.412 Saluran Pembuang Sekunder
- 611.413 Saluran Tersier
- 611.42 Bangunan
- 611.421 Bangunan Outlet
- 611.422 Bangunan Terjun
- 611.423 Bangunan Penahan Banjir
- 611.43 Gorong-gorong pembuangan
- 611.44 Talang pembuang
- 611.45 Syphon pembuangan
- 611.5 Bangunan lainnya
- 611.51 Jalan
- 611.511 Jalan Inspeksi
- 611.512 Jalan Logistik
- 611.52 Jembatan
- 611.521 Jembatan Inspeksi
- 611.512 Jalan Logistik Waduk Lapangan
- 611.52 Jembatan
- 611.521 Jembatan Inspeksi
- 611.522 Jembatan Hewan
- 611.53 Tangga Cuci
- 611.54 Kubangan Kerbau
- 611.55 Waduk Lapangan
- 611.56 Bangunan Penunjang
- 611.57 Jaringan Telepon
- 611.58 Stasiun Agro
- 612 Folder
- 612.1 Tanggul Keliling
- 612.11 Tanggul
- 612.12 Bangunan Penutup Sungai
- 612.13 Jembatan
- 612.2 Bangunan Pembawa



612.21	Saluran
612.211	Saluran Muka
612.212	Saluran Pembawa Waduk
612.213	Saluran Pembawa Sekunder
612.22	Stasiun Pompa Pemasukan
612.23	Bangunan Bagi
612.24	Gorong-Gorong
612.25	Syphon
612.3	Bangunan Pembuang
612.31	Stasiun Pompa Pembuang
612.32	Saluran
612.321	Saluran Pembuang Induk
612.322	Saluran Pembuang Sekunder
612.33	Pintu Air Pembuangan
612.34	Gorong-Gorong Pembuangan
612.35	Syphon Pembuangan
612.4	Bangunan Lainnya
612.41	Bangunan
612.411	Bangunan Pengukur Air
612.412	Bangunan Pengukur Curah Hujan
612.413	Bangunan Gudang Stasiun Pompo
612.414	Bangunan Listrik Stasiun Pompa
612.42	Rumah Petugas Aksploitasi
613	Pasang Surut
614	Pengendalian Sungai
614.1	Bangunan Pengaman
614.11	Tanggul Banjir
614.12	Pintu Pengatur Banjir
614.13	Klep Pengatur Banjir
614.14	Tembok Pengaman Talud
614.15	Krib
614.16	Kantung Lumpur
614.17	Check-Dam
614.18	Syphon
614.2	Saluran Pengaman
614.21	Saluran Banjir
614.22	Saluran Drainage
614.23	Corepure
614.3	Bangunan Lainnya
614.31	Warning System
614.32	Stasiun
614.321	Stasiun Pengukur Curah Hujan
614.322	Stasiun Pengukur Air
614.323	Stasiun Pengukur Cuaca
614.324	Stasiun Pos Penjagaan
615	Pengaman Pantai
615.1	Tanggul
615.2	Krib
615.3	Bangunan Lainnya
616	Air Tanah
616.1	Stasiun Pompa
616.2	Bangunan Pembawa
616.3	Bangunan Pembuang
616.4	Bangunan Lainnya
617	

618	
619	
620	JALAN
621	Jalan Kota / Kabupaten
621.1	Daerah Penguasaan
621.11	Tanah
621.12	Tanaman
621.13	Bangunan
621.2	Bangunan Sementara
621.21	Jalan Sementara
621.22	Jembatan Sementara
621.23	Kantor Proyek
621.24	Gedung Proyek
621.25	
621.26	Laboratorium Lapangan
621.27	Rumah
621.3	Badan Jalan
621.31	Pekerjaan Tanah (Earth Work)
621.32	
621.4	Perkerasan
621.41	Lapis Pondasi Bawah
621.42	Lapis Pondasi
621.43	Lapis Permukaan
621.5	Drainage
621.51	Parit Tanah
621.52	Gorong-Gorong (Culvert)
621.6	Buku Trotuir
621.61	Tanah
621.62	Perkerasan
621.63	Pasangan
621.7	Median
621.71	Tanah
621.72	Tanaman
621.73	Perkerasan
621.74	Pasangan
621.8	Daerah Samping
621.82	Tanaman
621.83	Pagar
621.9	Bangunan Pelengkap Dan Pengamanan
621.91	Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
621.92	Lampu Penerangan
621.93	Lampu Pengatur Lalu Lintas
621.94	Patok-Patok KM
621.95	Patok-Patok ROW (Sempadan)
621.96	Rel Pengamanan
621.97	Pagar
621.98	Turap Penahan
621.99	Bronjong
622	Jalan Luar Kota
622.1	Daerah Penguasaan
622.11	Tanah
622.12	Tanaman
622.13	Bangunan

622.2	Bangunan Sementara
622.21	Jalan Sementara
622.22	Jembatan Sementara
622.23	Kantor Proyek
622.24	Gudang Proyek
622.25	Barak Kerja
622.26	Laboratorium Lapangan
622.27	Rumah
622.3	Badan Jalan
622.31	
622.32	
	Perkerasan
622.41	Lapis Pondasi Bawah
622.42	Lapis Pondasi
622.43	Lapis Permukaan
622.5	Drainage
622.51	Parit
622.52	Gorong-Gorong (Culvert)
622.53	Sub Drainage
622.6	Trotoar
622.61	: [2] - [2]
622.62	
622.7	
622.71	HINGEN HER HER HELDER HER HELDER
622.72	
622.73	
622.74	Pasangan
622.8	Daerah Samping
622.81	Tanaman
622.82	Pagar
622.9	Bangunan Pelengkap Dan Pengamanan
622. 91	Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
622.92	
622.93 622.94	Lampu Pengatur Lalu Lintas Patok-Patok KM
622.95	
622.95	Patok-Patok ROW (Sempadan)
622.97	Rel Pengamanan
622.98	Pagar Turap Penahan
622.99	Bronjong
623	Bronjong
624	
625	
626	
627	
628	
629	
630	JEMBATAN
631	Jembatan pada jalan Kota/Kabupaten
631.1	Daerah penguasaan
631.11	Tanah
631.12	Tanaman
631.13	Bangunan

X

- 631.2 Bangunan Sementara
- 631.21 Jalan Sementara
- 631.22 Jembatan Sementara
- 631.23 Kantor Proyek
- 631.24 Gedung Proyek
- 631.25 Barak kerja
- 631.26 Laboratorium lapangan
- 631.27 Rumah
- 631.3 Pekerjaan Tanah (earth work)
- 631.31 Galian tanah
- 631.32 Timbunan tanah
- 631.4 Pondasi
- 631.41 Pondasi kepala jembatan
- 631.42 Pondasi Pilar
- 631.43 Pondasi angker
- 631.5 Bangunan bawah
- 631.51 Kepala jembatan
- 631.52 Pilar
- 631.53 Piloon
- 631.54 Landasan
- 631.6 Bangunan
- 631.61 Gelagar
- 631.62 Lantai
- 631.63 Perkerasan
- 631.64 Jalan orang/trotoir
- 631.65 Sandaran
- 631.66 Talang air
- 631.7 Bangunan pengaman
- 631.71 Turap/penahan
- 631.72 Bronjong
- 631.73 Strek Dam
- 631.74 Kist Dam
- 631.75 Coupute
- 631.76 Krib
- 631.8 Bangunan pelengkap
- 631.81 Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas
- 631.82 Lampu Penerangan
- 631.83 Patok R, O, W (Sempadan)
- 631.84 Patok pengamanan
- 631.9 Oprit
- 631.91 Badan
- 631.92 Perkerasan
- 631.93 Drainage
- 631.94 Baku
- 631.95 Mediun
- 632 Jembatan Luar Kota
- 632.1 Daerah Penguasaan
- 632.11 Tanah
- 632.12 Tanaman
- 632.13 Bangunan
- 632.2 Bangunan Sementara
- 632.21 Jalan sementara
- 632.22 Jembatan sementara
- 632.23 Kantor proyek
- 632.24 Gedung proyek



	Barak Kerja
	Laboratorium Lapangan
	Rumah
632.3	
	Galian Tanah
	Timbunan Tanah
	Pondasi
	Pondasi Kepala Jembatan
	Pondasi Pilar
	Pondasi Angker
	Bangunan bawah
	Kepala jembatan
632.52	
632.53	
	Landasan
	Bangunan
	Gelagar
632.62	
632.63	Perkerasan
	Jalan Orang/Trotoir
632.65	Sandaran
632.66	
632.7	Bangunan Pengaman
	Turap/Penahan
632.72	
	Strek Dam
632.74	
	Courpure
632.76	Krip
632.8	Bangunan Pelengkap
632.81	Rambu- rambu/ Tanda-tanda lalu lintas
632.82	Lampu Penerangan
632.83	Lampu Pengatur Lalu Lintas
632.84	Patok pengamanan
632.84	Patok R, O, W (Sempadan)
632.84	Pagar
632.9	Oprit
632.91	Badan
632.92	Perkerasan
632.93	Drainage
632.94	Baku
632.95	Mediun
633	
634	
635	
636	
637	
638	
639	
640	BANGUNAN
641	Gedung Pemerintah
641.1	Gedung Pengadilan
641.2	Rumah Pejabat Negara
	The state of the s

641.3	Gedung DPR	
-------	------------	--

- 641.4 Gedung Balai Kota
- 641.5 Penjara
- 641.6 Perkantoran
- 642 Bangunan Pendidikan
- 642.1 Taman Kanak-kanak
- 642.2 SD & Sekolah Menengah
- 642.3 Perguruan Tinggi
- 643 Bangunan Rekreasi
- 643.1 Bangunan Olah Raga
- 643.2 Gedung Kesenian
- 643.3 Gedung Pemancar
- 644 Bangunan Perdagangan
- 644.1 Pusat Perbelanjaan
- 644.2 Gedung Perdagangan
- 644.3 Bank
- 644.4 Perkantoran
- 645 Bangunan Pelayanan Umum
- 645.1 Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum
- 645.2 Gedung parkir
- 645.3 Rumah Sakit
- 645.4 Gedung telkom
- 645.5 Terminal Angkutan Umum
- 645.6 Terminal Angkutan Air
- 645.7 Terminal Angkutan Darat
- 645.8 Bangunan Keagamaan
- 646 Bangunan Peninggalan Sejarah
- 646.1 Monumen
- 646.2 Candi
- 646.3 Kraton
- 646.4 Rumah Tradisional
- 647 Bangunan Industri
- 648 Bangunan Tempat Tinggal
- 648.1 Rumah Perkantoran
- 648.11 Inti / Sederhana
- 648.12 Sedang / Mewah
- 648.2 Rumah Pedesaan
- 648.21 Rumah Contoh
- 648.3 Real estate
- 649 Elemen bangunan
- 649.1 Pondasi
- 649.11 Diatas Tiang
- 649.2 Dinding
- 649.21 Penahan beban
- 649.22 Tidak menahan beban
- 649.3 Atap
- 649.4 Lantai / langit-langit
- 649.41 Suspendend
- 649.42 Solit
- 649.5 Pintu / Jendela
- 649.51 Pintu Hermonik
- 649.52 Pintu biasa
- 649.53 Pintu Sorong
- 649.54 Jendela Kayu
- 649.55 Jendela Sorong

649.56 Jendela Vertical

650	TATA KOTA
651	Daerah Perdagangan/Pelabuhan
651.1	Daerah Pusat Perbelanjaan
651.2	Daerah Perkotaan
652	Daerah Pemerintahan
653	Daearah Perumahan
653.1	Kepadatan Rendah (Low Density)
653.2	Kepadatan Tinggi (High Density)
654	Daerah Industri
654.1	Industri Berat
654.2	Industri Ringan
654.3	Industri Rumah
655	Daerah Rekreasi
655.1	Publik Garden
655.2	Sport dan Playing Fields
655.3	Open Spece
656	Transportasi
656.1	Jaringan Jalan
656.11	Penerangan Jalan
656.2	Jaringan Kereta Api
656.3	Jaringan Sungai
657	Assaineering
657.1	Saluran Pengumpulan
657.2	Instansi Pengolahan
657.21	
657.211	Bangunan Penyaring
	Bangunan Penghancur Kotoran
	Bangunan Pengendapan
	Bangunan Pengering Lumpur
657.22	Unit Disinfektan
657.23	Unit Perpompaan
658	Kesehatan Lingkungan
658.1	Persampahan
658.11	Bangunan Pengumpulan
658.12	Bangunan Pemusnahan
658.2	Pengotoran Udara
658.3	Pengotoran Air
658.31	Air Buangan Industri
658.4	Kegaduhan
658.5	Kebersihan Kota
659	
660	TATA LINGKUNGAN
660.1	Persampahan
660.2	Kebersihan Lingkungan
660.3	Pencemaran
660.31	Pencemaran Air
660.32	Pencemaran Udara
660.33	
660.34	Pencemaran Limbah Padat dan Bahan Berbahaya Beracun (B3)
661	Daerah Hutan

661.1	Konservasi Pesisir dan Laut
661.2	Konservasi Sumber Daya Alam
662	Daerah Pertanian
663	Daerah Pemukiman
663.1	Air
663.2	Udara
663.3	Tanah
664	Pusat Pertumbahan
665	Transportasi
665.1	Jaringan Jalan
665.2	Jaringan Kereta Api
665.3	Jaringan Sungai
666	Pengembangan Kapasitas
667	Pengamanan Lingkungan
668	
669	
670	KETENAGAAN
C71	
671	Listrik
671.1	Kelistrikan
671.11	Kelistrikan PLN
671.12	Kelistrikan non PLN
671.2	Pembangkit Tenaga Listrik
671.21	PLTA - Pembangkit Listrik Tenaga Air
671.22	PLTD - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
671.23	PLTG - Pembangkit Listrik Tenaga Gas
671.24	PLTM - Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
671.25	PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
671.26	PLTPB - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
671.27	PLTU - Pembangkit Listrik Tenaga Uap
671.3	Transmisi tenaga listrik
671.31	Gardu Induk/gardu penghubung/gardu trafo
671.32	Saluran Udara Tenaga Listrik Kabel Bawah Tanah
671.33	[12] (B. M.
671.4 671.41	Distribusi Tenaga Listrik Gardu Distribusi
671.42	Tegangan Menengah
671.43	Tegangan Rendah
671.44	Jaringan Bawah Tanah
671.5	Pengusahaan Listrik
671.51	Sambungan Listrik
671.52	Penjualan Tenaga Listrik
671.53	Tarif Listrik
672	Tenaga Air
673	Tenaga Minyak
674	Tenaga Gas
675	Tenaga Matahari
676	Tenaga Nuklir
677	Tenaga Panas Bumi
678	Tenaga Uap
679	Tenaga Lainnua

680	PERALATAN
681	
682	
683	
684	
685	
686	
687	
688	
689	
690	AIR MINUM
691	Intake
691.1	Bromcaptering
691.2	Sumur
691.3	Bendungan
691.4	Saringan (Screen)
691.5	Pintu Air
691.6	Saluran Pembawa
691.7	Alat Ukur
691.8	Perpompaan
692	Transmisi air baku
692.1	Perpipaan
692.2	Katup Udara (Air Rolief)
692.3	Tutup Penguras (blow oof)
692.4	Bak Pelepas Tekanan
692.5	Jembatan Pipa
692.6	Syphon
693	Instalasi pengelolaan
693.1	Bangunan Ukur
693.2	Bangunan Aerasi
693.3	Bangunan Pengendapan
693.4	Bangunan Pembubuh Bahan Kimia
693.5	Bangunan Pengaduk
693.6	Bangunan Saringan
693.7	Perpompaan
693.8	Clear Hell
694	Distribusi
694.1	Reservoir Menara Bawah Tanah
694.11	Menara
694.12	Reservoir menara bawah tanah
694.2	Perpipaan
694.3	Perpompaan
694.4	Jembatan Pipa
694.5	Syphon
694.6	Hydran
694.61	Hydran umum
694.62	Hydran kebakaran
694.7	Katup
694.71	Katup Udara (air relief)
694.72	Katup pelepas (blow off)
694.8	Bak pelepas tekanan (pressuer reducing valve)

697	
698	
699	
	700 PENGAWASAN
	Perincian Ketiga
700	Pengawasan
700.1	Kebijakan dan program pengawasan
700.2	Pengawasan perencanaan pengadaan/proyek
701	Bidang Pengawasan Dalam
702	Bidang Peralatan
703	Bidang Kekayaan Daerah
704	Bidang Perpustakaan / Dokumentasi / Kearsipan Sandi
705	Bidang Perencanaan
706	Bidang Organisasi / Ketatalaksanaan
707	Bidang Penelitian
708	Bidang Konferensi
709	Bidang Perjalanan Dinas
710	BIDANG PEMERINTAHAN
711	Pidana Pomorintahan Pugat
712	Bidang Pemerintahan Pusat Bidang Pemerintahan Provinsi
	Bidang Pemerintahan Kabupaten/Kota
713	
714	Bidang Pemerintahan Desa
715	Bidang MPR / DPR
716	Bidang DPRD Provinsi
717	Bidang DPRD Kabupaten/Kota
718	Bidang HUkum
719	Bidang Hubungan Luar Negeri
720	BIDANG POLITIK
721	Bidang Kepartaian
722	Bidang Organisasi Kemasyarakatan
723	Bidang Organisasi Profesi dan Fungsional
724	Bidang Organisasi Pemuda
725	Bidang Organisasi Buruh, Tanidan Nelayan
726	Bidang Organisasi Wanita
727	Bidang Pemilihan Umum
728	Bidang Pencalonan Anggota MPR/DPR
729	
730	BIDANG KEAMANAN / KETERTIBAN
731	Bidang Pertahanan
732	Bidang Kemiliteran
733	Bidang Keamanan
734	Bidang Perlindungan Masyarakat
735	
736	Bidang Kejahatan
	Bidang Bencana Bidang Kecelakaan
737	Diddig Receiukaan

738	
739	
740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
741	Bidang Pembangunan Desa
742	Bidang Pendidikan
743	Bidang Kejahatan Kebudayaan
744	Bidang Kesehatan
745	Bidang Agama
746	Bidang Sosial
747	Bidang Kependudukan
748	Bidang Media Masa
749	
750	BIDANG PEREKONOMIAN
751	Bidang Perdagangan
752	Bidang Pertanian dan Perkebunan
753	BIdang Perindustrian
754	Bdang Pertambangan/Ksamuderaan
755	BidangPerhubungan
756	Bidang Tenaga Kerja
757	Bidang Permodalan
758	Bidang Perbankan/Moneter
759	Bidang Agraria
760	BIDANG PEKERJAAN UMUM
761	Bidang Pengairan
762	BIdang Jalan
763	Bidang Jembatan
764	Bidang Bangunan
765	Bidang Tata Kota
766	Bidang Lingkungan
767	Bidang Ketenagaan
768	Bidang Peralatan
769	Bidang Air Minum
770	BIDANG PENGAWASAN
771	
772	
773	
774	
775	
776	
777	
778 779	
780	BIDANG KEPEGAWAIAN
781	Bidang Pengadaan Pegawai
782	Bidang Mutasi Pegawai
783	Bidang Kedudukan Pegawai
	_ tata ty 120 addition 1 5 years at

784	Bidang Kesejahteraan Pegawai
785	Bidang Cuti
786	Bidang Penilaian
787	Bidang Tata Usaha Pegawai
788	Bidang Pemberhentian Pegawai
789	Bidang Pendidikan Pegawai
790	BIDANG KEUANGAN
791	Bidang Anggaran
792	Bidang Otorisasi
793	Bidang Verifikasi
794	Bidang Pembukuan
795	Bidang Pembendaharaan
796	Bidang Pembinaan Pembendaharaan
797	Bidang Pendapatan
798	
799	Bidang Bendaharawan
	800 KEPEGAWAIAN
	Perincian Ketiga
800	klasifikasi disini : Kebijakan Kepegawaian KEPEGAWAIAN
800.1	Perencanaan
800.2	Penelitian
800.043	Pengaduan
800.05	Tim
800.07	Statistik
800.08	Peraturan Perundang-Undangan
801	
802	
803	
804	
805	
806	
807	
808	
809	
810	PENGADAAN
	Meliputi Lamaran, pengujian kesehatan dan pengangkatan
	calon pegawai
811	Lamaran
811.1	Testing
811.2	Screening
811.3	Pengumuman Tes dan Pemanggilan
812	Pengujian Kesehatan
212	Penganakatan CPNS

f

813 813.1 813.2 813.3

813.4	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan IV
813.5	Pengangkatan Calon Guru Inpres
814	Pengangkatan Tenaga Lepas
814.1	Pengangkatan Tenaga Bulanan / Tenaga Kontrak
814.2	Pengangkatan Tenaga Harian
814.3	Pengangkatan Tenaga Pensiunan
815	Pengangkatan Tenaga Asing
816	
817	
818	
819	
820	MUTASI
821	Pengangkatan
821.1	Pengangkatan CPNS Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
821.11	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I
821.12	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan 2
821.13	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan 3
821.14	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 4
821.15	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Yang Cuti Di
	Luar Tanggungan Negara
821.2	Pengangkatan Dalam Jabatan, Pembebasan Dari Jabatan, Berita
	Acara Serah Terima Jabatan
821.21	Sekjen/Dirjen/Irjen/Kabag
821.22	Kepala Biro/Direktur/Inspektur/KepalaPusat/Sekretaris/Kepala
	Dinas/Asisten Sekwilda
821.23	Kepala Bagian/Kepala Sub Direktorat/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu
821.24	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Pemeriksa
821.25	Residen/Pembantu Gubernur
821.26	Wedana/Pembantu Bupati
821.27	Camat
821.28	Lurah Administratif (Lurah Desa)
821.29 822	Jabatan Lainnya Kangikan Gaji Parkala
822.1	Kenaikan Gaji Berkala PNS Golongan I
822.2	PNS Golongan II
822.3	PNS Golongan III
822.4	PNS Golongan IV
823	Kenaikan Pangkat
823.1	PNS Golongan I
823.2	PNS Golongan II
823.3	PNS Golongan III
823.4	PNS Golongan IV
824	Pemindahan/Pelimpahan/Pembantuan
824.1	PNS Golongan I
824.2	PNS Golongan II
824.3	PNS Golongan III
824.4	PNS Golongan IV
824.5	Lolos Butuh (Mutasi Pegawai dari Instansi Lain)
824.6	Kurikulum dan Silabi
824.7	Proposal (TOR)
825	Datasering dan Penempatan Kembali
826	Penunjukan Tugas Belajar
826.1	Dalam Negeri

826.2	Luar Negeri
826.3	Tunjangan Belajar
826.4	Penempatan Kembali
827	Wajib Militer
828	Mutasi Dengan Instansi Lain
829	
830	KEDUDUKAN
	Meliputi: Perhitungan Masa Kerja, Penyesuaian
001	Pangkat/Gaji, Penghargaan Ijasah, Dan Jenjang Pangkat
831 832	Perhitungsn Masa Kerja
832.1	Penyesuaian Perangkat/Gaji PNS Golongan I
832.2	PNS Golongan II
832.3	PNS Golongan III
832.4	PNS Golongan IV
833	Penghargaan Ijasah
834	Jejang Pangkat/Esselon
835	
836	
837	
838	
839	
840	KESEJAHTERAAN PEGAWAI
	Meliputi: Tunjangan, Dana, Perawatan Kesehatan, Koperasi,
	Distribusi, Permahan/Tanah, Bantuan Sosial, Rekreasi Dan
	Dispensasi.
841	Tunjangan
841.1	Jabatan/Struktural dan Fungsional
841.2	Kehormatan
841.3	Dana Kematian (Uang Duka)
841.4	Tunjangan Hari Raya
841.5	Perjalanan Dinas Tetap/Cuti/Pindah
841.6	Keluarga
841.7	Sandang,Pangan,Papan (Bapertarum)
842	Dana
842.1	Taspen
842.2	Askes, Bantuan Kesehatan
842.3	Asuransi
843	Perawatan Kesehatan
843.1	Poliklinik , Klinik Konsultasi
843.2	Perawatan Dokter
843.3	Obat-obatan
843.4	Keluarga Berencana
845	Perumahan / Tanah
845.1	Perumahan Pegawai
845.2 845.3	Tanah Kapling Losmen/Hotel
846	Bantuan Sosial
846.1	Bantuan Kebakaran
846.2	Bantuan Kebanjiran
847	Rekreasi
848	Dispensasi
	Disperiousi

f

849	
850	CUTI
	Meliputi Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti
051	Hamil, Cuti Naik Haji, Cuti
851	Cuti Tahunan
852	Cuti Besar
853	Cuti Sakit
854	Cuti Hamil
855	Cuti Naik Haji/Karna Alasan Penting
856	Cuti di Luar Tanggungan Negara
857	Cuti Alasan Lain/Alasan Penting
858	
859	
860	PENILAIAN
	Meliputi: Penghargaan, Hukuman, Konduite, Ujian
051	Dinas, Penilaian Kakayaan Pribadi Dan Rehabilitasi
861	Penghargaan
861.1	Bintang / Satyalencana Karya Satya
861.2	Kenaikan Pangkat Anumerta
861.3	Hadiah Gaji Istimewa
861.4	Hadiah Berupa Uang
861.5	Pegawai Teladan
862 862.1	Hukuman Taguran Peringatan
862.2	Teguran Peringatan Penundaan Kenaikan Gaji
862.3	Penurunan Pangkat
862.4	Pemindahan
002.4	Catatan: Pemberhentian Untuk Sementara Waktu Dan
	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Lihat 887 Dan 888
863	Konduite, DP3, Disiplin Pegawai
864	Ujian Dinas
864.1	Tingkat I
864.2	Tingkat II
864.3	Tingkat III
865	Penilaian Kehidupan Pegawai
	Meliputi: Petunjuk Pelaksanaan Hidup Sederhana, Penilaian
	Kekayaan Pribadi (LP2P)
865.1	Stuktural
865.2	Fungsional
866	Rehabilitasi/Pengaktifan Kembali
867	
868	
869	
870	TATA USAHA KEPEGAWAIAN
	Meliputi: Formasi, Bezetting, Registrasi, Daftar, Riwayat
071	Hidup, Hak, Penggajian, Sumpah,/Janji Dan Korps Pegawai
871	Formasi
872	Bezetting / Daftar Urut Kepegawaian
873	Registrasi, Sistem Informasi Kepegawaian
873.1	NIP

873.2	KARPEG
873.3	Legitimasi / Tanda Pengenal
873.4	Daftar Keluarga
873.5	KARSU / KARIS
874	Daftar Riwayat Pekerjaan
874.1	Tanggal Lahir
874.2	Penggantian Nama
874.3	Izin kepartaian Organisasi
875	Kewenangan Mutasi Kepegawaian
875.1	Pelimpahan Wewenangan
875.2	Spesimen Tanda Tangan
876	Pengajian
876.1	SKPP
877	Sumpah/Janji Pegawai
878	Korps Pegawai
879	
880	PEMBERHENTIAN
	Meliputi Atas Pemberhentian, Permintaan Sendiri, Dengan
	Hak Pensiun, Karena Meninggal Dunia, Alasan Lain, Dengan
	Diberi Uang
	Pesangon, Uang Tnggu Untuk Sementara Waktu Dan
	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
881	Permintaan Sendiri
882	Dengan Hak Pensiun
882.1	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun PNS Gol.I
882.2	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun PNS Gol.II
882.3	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun PNS Gol.III
882.4	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun PNS Gol.IV
882.5	Pensiun Janda / Duda
882.6	Pensiun Yatim Piatu
882.7	Uang Muka Pensiun
883	Karena Meninggal
883.1	Karena Meninggal Dalam Tugas
884	Alasan Lain
885	Uang Pesangon
886	Uang Tunggu
887	Untuk Sementara Waktu
888	Tidak Dengan Hormat
889	
890	PENDIDIKAN PEGAWAI
891	Perencanaan
891.1	Program
891.2	Kurikulum dan Silabi
891.3	Proposal (TOR)
892	Pendidikan Reguler
892.1	IPDN / APDN
892.2	Kursus-Kursus Reguler
893	Pendidikan dan Pelatihan
893.1	LEMHANAS
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural, SPATI, SPAMEN,
893.2	SPAMA, ADUMLA, ADUM
893.3	Kursus-Kursus / Penataran

893.4	Diklat Tehnik, Fungsional Dan Manajemen Pemerintahan
893.5	Diklat Lainnya
894	Pendidikan Ke Luar Negeri
894.1	Berkesinambungan / Berkala / Bergelar
894.2	Non Gelar / Diploma
895	Metode
895.1	Kuliah
895.2	Ceramah, Simposium
895.3	Diskusi, Raker, Seminar, Lokakarya, Orientasi
895.4	Kuliah Lapangan / OL, Widya Wisata, KKN
895.5	Tanya Jawab / Silabi / Modul / Kurikulum
895.6	Karya Tulis,
895.7	Penugasan
895.8	Gladi
896	Tenaga Pengajar
896.1	Moderator
897	Administrasi Pendidikan
897.1	Tahun Pelajaran
897.2	Persyaratan, Pendaftaran, Testing, Ujian
897.3	STTP
897.4	Penilaian Angka Kredit
897.5	Laporan Pendidikan Dan Pelatihan
898	Fasilitas Belajar
898.1	Tunjangan Belajar
898.2	Asrama
898.3	Uang Makan
898.4	Uang Transport
898.5	Uang Buku
898.6	Uang Ujian
898.7	Uang Semester / Uang Kuliah
898.8	Uang Saku
899	Sarana
899.1	Bantuan Sarana Belajar
899.2	Bantuan Alat-Alat Tulis
899.3	Bantuan Sarana Belajar Lainnya
	900 KEUANGAN
	Perincian Ketiga
901	Nota Keuangan
902	APBN
903	APBD
904	APBN-P
905	Dana Alokasi Umum (DAU)
906	Dana Alokasi Khusus (DAK)
907	Dekonsentrasi (Pelimpahan Dana Dari Pusat Ke Daerah)
908	
909	
910	ANGGARAN
911	Rutin
912	Pembangunan
913	Anggaran Belanja Tambahan
914	Daftar Isian Kegiatan (DIK)
	The second secon

	2 0 11 1 11 1 (DIM)	
914.1	Daftar Usulan Kegiatan (DUK)	
914.2	Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)	
914.3	Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA))
915	Daftar Isian Proyek (DIP)	
915.1	Daftar Usulan Proyek (DUP)	
915.2	Daftar Isian Pengguna anggaran (DIPA)	
915.3	Daftar Usulan Proyek Daerah (DUPDA)	
916	Revisi Anggaran	
917		
918		
919		
920	OTORISASI/SKO	
921	Rutin	
922	Pembangunan	
923	SIAP	
923.1	SIAPDA	
924	SKO	
924.1	Ralat SKO	
925		
926		
927		
928		
929		
930	VERIFIKASI	
931	SPM Rutin	
932	SPM Pembangunan	
933	Penerimaan	
934	SPJ Rutin	
935	SPJ Pembangunan	
936	Nota Pemeriksaan	
937	SP Pemindahbukuan	
938		
939		
939		
040	DEMDITUTAN	
940	PEMBUKUAN	
941	Penyusunan Perhitungan Anggaran	
		ila Dambanaunan
942	Permintaan Data Anggaran Laporan Fisi	ik Pembangunan
943	Laporan Fisik Pembangunan	
944		
945		
946		
947		
948		
949		
950	PEMBENDAHARAAN	
951	Tuntutan Ganti Rugi	
952	Tuntutan Pembendaharaan	4
		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

953	Penghapusan Kekayaan Negara
954	Penunjukan/Pemberhentian Bendaharawan
955	Specimen Tanda Tangan
956	Surat Tagihan Piutang, Iktisar Bulanan
957	
958	
959	
959	
960	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN
961	Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kasa
962	Pemeriksaaan Administrasi Bendaharawan
963	Laporan Keuangan Bendaharawan
964	
965	
966	
967	
968	
969	
970	PENDAPATAN
971	Perimbangan Keuangan
971.1	Bagi Hasil Pajak
971.11	Pajak Bumi Bangunan (PBB)
971.12	Bela Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (PBHTB)
971.13	Pajak Pengasilan Orang Pribadi (PPh Pasal 21)
971.2	Bagi Hasil Bukan Pajak
971.21	Sumber Daya Alam / Migas
972	Subsidi
973	Pajak.Ipeda, IHH, IHPH
973.1	Pajak Kendaraan Bermotor
973.2	Pajak Kendaraan Diatas Air
973.3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
973.4	Pajak Pengendalian & Pemanfaatan Air Permukaan
973.5	Pajak Reklame
974	Retribusi
974.1	Retribusi Bidang Kesehatan
974.2	Retribusi Bidang Seni Budaya dan Pariwisata
974.3	Retribusi Bidang Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan
	(termasuk pasar)
974.4	Retribusi Bidang Pertanian dan Perternakan (Termasuk
	Pemotongan Hewan)
974.5	Retribusi Bidang Perhubungan, Komunikasi Informasi dan
	Teknologi (Termasuk Trayek, Kelebihan Muatan, Telekomunikasi
	Parkir dll)
974.6	Retribusi Bidang Perkebunan dan Kehutanan (Termasuk Lintas
	dan Lelang Hasil Hutan, Flora Fauna dll)
974.7	Retribusi Bidang Perikanan dan Kelautan
974.8	Retribusi Bidang Pertambangan, Pemanfaatan Air permukaan
	dan Metrologi
974.9	Retribusi Bidang Lainnya (termasuk sampah)
975	Bea
975.1	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

975.2	Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air
976	Cukai
977	Pungutan/PNPB
978	Bantuan
978.1	Bantuan Presiden
978.2	Bantuan Menteri
978.3	Bantuan Gubernur
978.4	
978.5	Bantuan Bupati
	Bantuan Lainnya
979	
980	
981	
982	
983	
984	
985	
986	
987	
988	
989	
000	DRAW ATTA DAWAN
990	BENDAHARAWAN
991	SKPP/SPP
992	Tegoran SPJ
993	regorari SI o
993	
995	
995	
996	
997	
998	
999	

Ditetapkan di Putussibau Pada tanggal,

BUPATI KAPUAS HULU, 4

A M NASIR